

**PERANAN B. J. HABIBIE
DALAM PERCATURAN POLITIK NASIONAL
TAHUN 1990 – 1998**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Ponco Margo Utomo

NIM: 041314009

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2009

SKRIPSI

**PERANAN B. J. HABIBIE
DALAM PERCATURAN POLITIK NASIONAL
TAHUN 1990-1998**

Oleh:

Ponco Margo Utomo
NIM: 04131009

Telah disetujui oleh :

Pembimbing

Drs. A.A. Padi

Tanggal 17 April 2009

SKRIPSI

**PERANAN B. J. HABIBIE
DALAM PERCATUREN POLITIK NASIONAL
TAHUN 1990-1998**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Ponco Margo Utomo

NIM : 041314009

Telah dipertahankan di depan panitia penguji

Pada tanggal 1 Mei 2009

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.

Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.

Anggota : Drs. A.A. Padi.

Anggota : Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

Anggota : Dra. Th. Sumini, M.Pd.

Tanda tangan

Yogyakarta 1 Mei 2009

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan.



Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.

MOTTO

Orang itu kaya bila mempunyai perbendaharaan kenangan, baik yang manis maupun yang pahit getir, sehingga ia dapat memandang hari esok dengan penuh harapan, menoleh ke hari kemarin dengan senyum syukur, dan menancapkan langkahnya hari ini dengan tegak mantap, berdasarkan hidup kasih sayang dan penuh pengertian.

(Komentar Baden Powell)


Homo Homini Socius (Jadilah Sahabat Bagi Sesama)

(Obsesi Driyarkara)

Hidup harus selalu Bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan, Optimis dalam kehidupan, dan Berfikir Positif di hadapan Tuhan

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya kecil ku ini kupersembahkan teruntuk :
Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melindungi, mendampingi dan
selalu memberikan segala hal yang terbaik dalam setiap langkah
hidupku. Kedua keluargaku tercinta dan semua orang yang saya
sayangi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

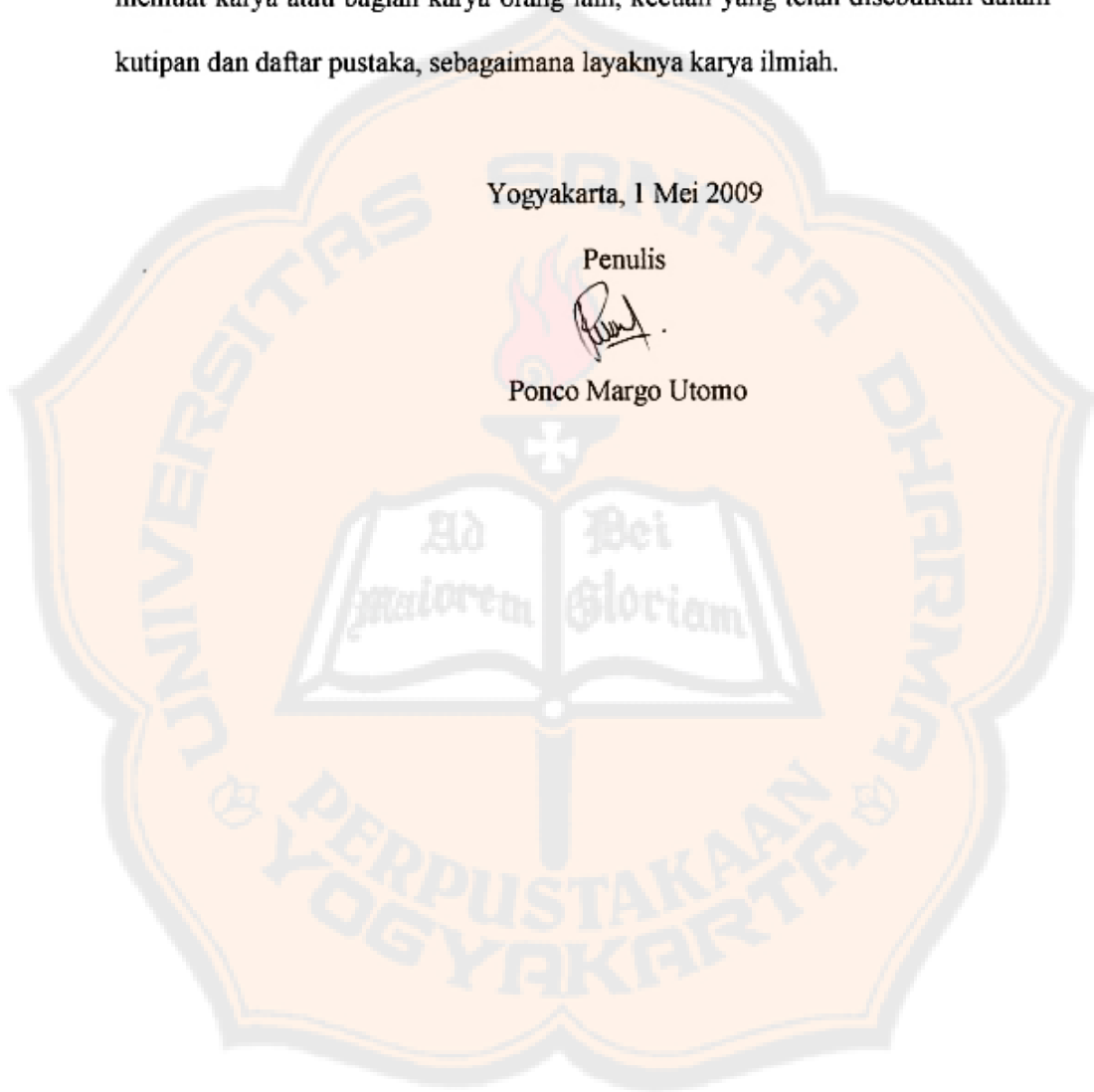
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 1 Mei 2009

Penulis



Ponco Margo Utomo



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Ponco Margo Utomo

NIM : 041314009

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

PERANAN B.J. HABIBIE DALAM PERCATURAN POLITIK NASIONAL TAHUN 1990 - 1998

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 15 Mei 2009

Yang menyatakan



(Ponco Margo Utomo)

ABSTRAK

PONCO MARGO UTOMO

041314009

**PERANAN B.J. HABIBIE DALAM PERCATUREN POLITIK NASIONAL
TAHUN 1990-1998**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis empat permasalahan pokok, yaitu (1) percaturan politik nasional tahun 1990-1998; (2) faktor pendorong B.J. Habibie memasuki percaturan politik nasional; (3) aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional; (4) Peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah. Langkah-langkah dalam penulisan metode sejarah meliputi pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi data dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan politik dan psikologi. Model penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) percaturan politik nasional tahun 1990-1998 berisi tentang strategi perjuangan dari kekuatan-kekuatan politik masa Orde Baru. Salah satunya adalah OPP, misalnya Golkar yang membagi tiga jalur, masing-masing jalur A yaitu ABRI, jalur B yaitu Birokrat (KORPRI), jalur G yaitu seluruh jajaran anggota di luar ABRI dan birokrat. (2) Faktor pendorong B.J. Habibie memasuki percaturan politik nasional salah satunya adalah kedekatan B.J. Habibie dengan Soeharto sebagai Presiden RI. (3) Aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional salah satunya adalah sebagai ketua Umum ICMI yang ingin mengajak kaum muslimin menjadi pelopor dan penggerak utama bagi bangsa Indonesia untuk berilmu, berteknologi dan berproduktivitas tinggi. (4) Peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional salah satunya adalah melalui ICMI berperan menyatukan para cendekiawan muslim dalam satu wadah dan menjadi penghubung antara pemerintahan Soeharto dengan umat Islam.

ABSTRACT

**PONCO MARGO UTOMO
(041314009)**

**THE ROLE OF B.J. HABIBIE IN NATIONAL POLITICS
1990-1998**

The purpose of this research is to describe and analyze four main problems: (1) national political constellation during 1990-1998; (2) B.J.Habibie's motivation to involve the national political constellation; (3) B.J.Habibie's activities in the national political constellation; and (4) B.J.Habibie's role in the national political constellation.

The method that is applied in writing is a historical method that includes five steps: topic selection, heuristic, source criticism, data interpretation, and historiography. Whereas the approaches are the political and psychological approaches. This writing is a descriptive analytical model.

The result indicates that: (1) the national political constellation in the period of 1990 to 1998 was full of strategic struggles of the New Order political forces, one of which was Practical Political Organizations, such as *Golkar* that divided its tracks of struggling into three: Track A (Armed Forces), Track B (Bureaucracy), and Track G (other groups than the Armed Forces and the bureaucracy). (2) B.J.Habibie's motivation to involve in the national political constellation was his close relationship with Soeharto as the President of the Republic of Indonesia. (3) one of B.J.Habibie's activities in the national political constellation was as the Chairman of ICMI (Indonesian Intellectual Moslems Association) that was eager to urge the Moslems to be pioneers and main motivators for the nations in the effort to be intelligent in knowledge, technology, and high productivity. (4) B.J.Habibie's role in the national political constellation, among others, was unifying the intellectual Moslems in one organization and becoming the moderator between Soeharto and the moslems.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Peranan B.J. Habibie Dalam Percaruran Politik Nasional tahun 1990-1998”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi prasyarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Universitas Sanata Dharma.

Selama menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, dukungan, bantuan dan perhatian dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
4. Bapak Drs. A.A. Padi selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan, dan sumbangan pemikiran yang sangat berharga bagi penulis hingga terselesaikannya penulisan ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Sejarah dan petugas sekretariat yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Sanata Dharma.
6. Staf UPT Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang banyak membantu penulis menemukan buku-buku dalam rangka penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Bapak A. Makmur Makka, yang telah menerima penulis di kantor *The Habibie Centre* (THC). Serta petugas perpustakaan THC.
8. Kedua orang tua, Bapak Sudarman dan Ibu Umi Lestari yang telah memberikan semangat, doa, dan kebutuhan material bagi penulis. Kakakku Wiwin Ristiani, Tri Agung ariyanto dan Iin Indriani serta Adikku Tedy Setiadi yang telah memberikan dorongan dan bantuannya selama ini.
9. Sahabat-sahabatku, Cycil Oki, Maria, Joko, Hesti, Sigit, Hendri, Willy, Astri, Riko, Acong, Yogi, Joni, Yuda, Mas Hari, Mas Ganang, Bang Markus terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan makalah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan pemikiran, saran maupun kritik yang bertujuan untuk menyempurnakan penulisan ini.

Penulis

Ponco Margo Utomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Landasan Teori	10
F. Metode dan Pendekatan	17
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II. PERCATURAN POLITIK NASIONAL	
TAHUN 1990-1998	25
A. Kekuatan – kekuatan Politik Nasional Tahun 1990-1998	25
B. Politik Orde baru	33
C. Posisi B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional ...	35

BAB III. FAKTOR PENDORONG B.J. HABIBIE

MEMASUKI PERCATURAN POLITIK NASIONAL ..	37
A. Kedekatan B.J. Habibie dengan Soeharto sebagai Presiden RI.....	37
B. Nasionalisme B.J. Habibie Muda.....	43
C. B.J. Habibie sebagai ahli IPTEK	47
D. Perkenalan B.J. Habibie dengan tokoh Islam lewat ICMI	49
E. Situasi dan Kondisi Politik Orde Baru Tahun 1990-1998	52

**BAB IV. AKTIVITAS B.J. HABIBIE DALAM PERCATURAN
POLITIK NASIONAL TAHUN 1990-1998.....**

A. Aktivitas B. J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI	62
B. Aktivitas B.J. Habibie Sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar	68
C. Aktivitas B. J. Habibie sebagai Wakil Presiden dan Presiden RI	72

**BAB V. PERANAN B.J. HABIBIE DALAM PERCATURAN
POLITIK NASIONAL TAHUN 1990-1998.....**

A. Peranan B.J. sebagai Ketua Umum ICMI.....	77
B. Peranan B.J. Habibie Sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar	80
C. Peranan . J. Habibie sebagai Wakil Presiden dan Presiden RI	82

BAB VI. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Gambar foto B.J. Habibie
- Lampiran 2 : Silabus
- Lampiran 3 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bacharuddin Jusuf Habibie lahir tanggal 25 Juni 1936 di Sulawesi dan berdarah campuran Jawa-Bugis dari Alwi Abdul Jalil Habibie dengan RA. Tuti Marini Puspowardojo.¹ B.J. Habibie ini tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia sebagai seorang tokoh yang turut berperan dalam perpolitikan Indonesia. Karier politik B.J. Habibie sebenarnya mulai terlihat secara nyata pada tahun 1990 ketika ia diangkat menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, tahun 1993 diangkat menjadi Koordinator harian Ketua Dewan Pembina Golkar, tahun 1997 diangkat menjadi Wakil Presiden dan tahun 1998 sebagai Presiden. Tetapi jauh sebelumnya ia sudah terlibat dalam pemerintahan sebagai kaum teknokrat (tahun 1973) dan tahun 1978 ia diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, serta jabatan-jabatan penting lainnya, hanya belum begitu kental dengan peranannya dalam bidang perpolitikan di Indonesia.

Karir B.J. Habibie dalam pemerintahan di mulai pada tahun 1973 ketika ia dihubungi oleh Direktur Utama Pertamina, Jenderal Ibnu Sutowo di Jerman Barat. Di luar dugaan B.J. Habibie diminta kesediaanya untuk memimpin suatu bagian di Pertamina yaitu sebagai Divisi Maju di Indonesia. Satu tahun kemudian, ketika B.J. Habibie akan diangkat menjadi Wakil

¹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005, hlm. 631

Presiden Penerapan Teknologi di Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB), ia kembali ke Indonesia untuk menjabat sebagai penasehat pemerintah dan Pertamina mengenai teknologi maju dan aeronautika, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada bulan April 1976 ia diangkat menjadi Presiden Direktur Industri Pesawat Terbang Negara, PT Nurtanio. Tahun 1978 merupakan tahun yang sibuk bagi B.J. Habibie. Pada tanggal 29 Maret ia diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi; pada tanggal 28 Agustus menjabat Direktur Utama Perusahaan Negara Perum Dok dan Galangan Kapal; dan tanggal 20 September diangkat menjadi Direktur sebuah badan negara yang dinamakan “Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi” (BPPT).²

Sebagai awal diangkatnya teknokrat, B.J. Habibie merupakan tokoh yang dianggap mempunyai pemikiran-pemikiran pembangunan yang sangat brilian tetapi juga dianggap oleh sebagian kaum teknokrat sebagai penantang baru otoritas kelompok teknokrat lainnya yaitu “kelompok Widjojo” (Emil Salim, Soebroto, Soehoed, Soemarlín, Barli Halim dan Prof. Suhadi Mangkusuwondo serta mereka yang berada di luar pemerintahan yaitu Soemitro dan Sadli). Banyak orang memandang perbedaan antara kelompok Widjojo dan kaum teknokrat seperti B.J. Habibie sebagai perbedaan antara pandangan makro-ekonomi dan mikro-ekonomi, teoritis lawan aktivis, gaya ahli ekonomi lawan gaya insinyur, pendidikan Amerika lawan pendidikan Eropa.

² Yahya A. Muhaimin, “*Bisnis dan Politik*” *Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta, LP3ES (lembaga penelitian pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial), 1991, hlm. 124

Pada tahun 80-an B.J. Habibie tidak jauh berbeda seperti tahun sebelumnya yaitu sibuk sebagai kaum teknokrat dan Menteri Riset dan Teknologi serta jabatan-jabatan penting lainnya. Pada tahun 1989, ia diangkat sebagai Ketua Badan Pengelola Industri Strategi (BPIS) yang membawahkan sejumlah BUMN besar seperti PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra, PT Barata Indonesia dan PT IPTN. Selanjutnya, Soeharto juga mempercayainya memimpin proyek pengembangan kawasan Indonesia Timur.³

Masih pada tahun 80-an, B.J. Habibie banyak menerima penghargaan dari luar negeri dan sekaligus merupakan penghargaan tertinggi yang pernah diterima oleh putra Indonesia. Lembaga-lembaga berprestise di dunia menganugerahkan dan menerima putra Indonesia ini sebagai anggota kehormatan, misalnya “*Gessellschaft Luft und Raumfahrt*” (Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar) Jerman Barat tahun 1983. Anggota dari “*The Royal Swedish Academy of Angineering Science*”, Swedia pada Mei 1985. Anggota dari “*Academy of Nationale de l’Air de l’Espace*”, Perancis bulan Juni 1985. Award Von Karman dari ICAS tahun 1992, setara hadiah Nobel dalam dunia dirgantara. Sebelumnya, Februari 1986 diangkat menjadi anggota dari “*The Us Academy of Engineering*” pada suatu upacara yang anggun dan terhormat.⁴

Kemudian pada tahun 90-an, B.J. Habibie mulai menampakkan perannya dalam perpolitikan nasional. Diawali dengan terpilihnya B.J. Habibie sebagai ketua umum ICMI atas dukungan dari beberapa kalangan

³ Adian Husaini, *Habibie Soeharto dan Islam*, Jakarta, Gema Insani Pres, 1995, hlm. 61

⁴ A. Makmur Makka, *B.J.Habibie Kisah Hidup & Kariernya*, Jakarta, Gema Insani Pres, 1995, hlm. 17

antara lain dari pada intelektual Islam serta para mahasiswa dari Universitas Brawijaya (Unibraw) yang dianggap sebagai pelopor berdirinya organisasi tersebut.

Beberapa hari setelah B.J. Habibie terpilih sebagai ketua umum ICMI ia menyampaikan mengenai lingkungan barunya sebagai berikut:

“Saya sekarang sudah berumur 54 tahun, tak bisa diubah karakternya. Sudah saya sampaikan kepada teman dan para pendiri. Kalau anda harapkan saya untuk membuatkan madrasah, pesantren, IAIN, jadi juara MTQ internasional, *I'm the wrong man*. Tapi kalau saudara harapkan saya membantu memberantas buta huruf iptek, sedemikian rupa hingga anak cucu kita di masa yang akan datang ikut berperan serta aktif dalam proses nilai tambah, dalam pembangunan seluruh bangsa Indonesia-dimana umat Islam pegang peran utama karena memang ia yang paling besar-*I'm going to do that*. Karena memang itu keseimbangan saya sendiri”.⁵

Sebenarnya ICMI bukan merupakan organisasi bercorak politik, tetapi secara tidak langsung sudah memberi warna bagi perpolitikan nasional. ICMI merupakan organisasi masa yang lebih berorientasi untuk mencerdaskan bangsa.⁶

Peranan B.J. Habibie dalam perpolitikan nasional sangat nampak ketika menjabat sebagai Koordinator Harian Ketua Dewan Pembina Golkar pada tahun 1993, B.J. Habibie terlibat langsung dalam dinamika politik dari partai Golkar. Ada fenomena menarik sepanjang perjalanan hidup dari B.J. Habibie, yang keterlibatannya secara politis dalam tubuh Golongan Karya (Golkar). Jika seluruh perjalanan kehidupan B.J. Habibie ditarik dalam satu rentangan waktu, maka fenomena ini menjadi momentum sejarah tersendiri. Ia

⁵ *Ibid.*, hlm. 141

⁶ “ICMI Bukan Organisasi Politik”, Kompas, 5 Februari 1997 dalam Dokumen Kliping Tentang Peta Politik Di Indonesia, Jakarta, Centre For Strategic And Internasional Studies

yang selama ini lebih dikenal orang dengan tugas-tugas pemerintah dan industri teknologi maju, tiba-tiba harus menempati fungsi lain di lingkungan politik. Padahal lapangan itu di luar disiplin yang telah mendarah daging dalam dirinya yaitu teknologi, hal yang memang diakuinya.⁷

B.J. Habibie dengan posisi strategisnya di tubuh partai maupun pemerintahan akhirnya membawa ia pada suatu jabatan lainnya yaitu diangkatnya sebagai Wakil Presiden pada tahun 1997, hal ini tentulah tidak semata-mata karena kedekatan B.J. Habibie dengan Presiden atau dengan partainya tetapi didukung juga kemampuannya sebagai ahli teknologi.

Pada tahun 1998 terjadi peristiwa besar yang digerakkan oleh kekuatan mahasiswa dengan berbagai tuntutan, salah satunya adalah menuntut turunnya Soeharto sebagai Presiden. Peristiwa ini yang akhirnya membawa B.J. Habibie ke dalam jabatan yang lebih tinggi, bahkan merupakan puncak karier politik dalam pemerintahan yaitu diangkatnya sebagai Presiden.

Diangkatnya B.J. Habibie, kali ini bukan hanya karena pengaruh atau peranannya dalam pemerintahan, tetapi karena memang pada saat itu B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden dan sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945 harus menggantikan Presiden. Selain itu juga B.J. Habibie adalah salah satu orang yang berpengaruh pada partai Golkar, yang merupakan salah satu partai politik dan mempunyai kekuatan politik besar pada masa itu.

Pada masa Presiden B.J. Habibie, banyak orang menganggap bahwa masa kekuasaan B.J. Habibie merupakan masa transisi kekuasaan dari masa

⁷ A. Makmur Makka, *op. cit.*, hlm. 155

yang kita kenal sebagai Orde Baru⁸ ke Orde Reformasi⁹. Walaupun B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden selama 17 bulan tentu memberikan peran yang tidak sedikit bagi pemerintahan Indonesia. Salah satunya membawa Indonesia pada pemilu tahun 1999 yang menyuarakan demokratisasi dalam pemilu serta peran-perannya yang lain dalam hal politik misalnya membebaskan para tahanan politik dan memberi kebebasan pada Pers.

Peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tentunya memberikan warna tersendiri dan juga memberikan dampak-dampak yang menarik untuk dikaji sebagai pembelajaran politik nasional. Dalam penelitian ini akan ditelusuri peranan B.J. Habibie dalam perpolitikan nasional dimulai dari tahun 1990 sampai 1998. Walaupun sebenarnya keterlibatan B.J. Habibie dalam perpolitikan secara langsung dimulai pada tahun 1993 dengan diangkatnya sebagai Koordinator Harian Golkar. Tetapi pada tahun sebelumnya B.J. Habibie telah memberikan pengaruh perpolitikan nasional secara tidak langsung dengan diangkatnya sebagai Ketua ICMI, khususnya perpolitikan Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana percaturan politik nasional tahun 1990-1998 ?

⁸ Periode kekuasaan Soeharto dari pertengahan 1965 hingga Mei 1998

⁹ Masa Pemerintahan Habibie dari Mei 1998 hingga Oktober 1999

2. Faktor apa yang mendorong B.J. Habibie memasuki percaturan politik nasional tahun 1990-1998 ?
3. Bagaimana aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998 ?
4. Bagaimana peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998 ?

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini dapat dilihat melalui dua aspek yang berbeda yaitu tujuan secara khusus dan tujuan secara umum. Adapun tujuan tersebut adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis percaturan politik nasional tahun 1990-1998.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong B.J. Habibie memasuki percaturan politik nasional tahun 1990-1998..
3. Mendeskripsikan dan menganalisis aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998.

b. Manfaat

1. Bagi penulis

Penulisan penelitian ini akan menambah pengetahuan baru bagi penulis mengenai sejarah politik di Indonesia dari aktivitas B.J Habibie dalam percaturan politik nasional.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi dan memperkaya karya ilmiah tentang studi sejarah politik.

D. Kajian Pustaka

Sumber utama yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber primer serta sumber sekunder sebagai pendukung. Adapun sumber-sumber buku itu adalah :

1. Sumber Primer

Buku *Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, buku ini ditulis oleh Bacharuddin Jusuf Habibie pada tahun 2006 yang diterbitkan oleh THC Mandiri Jakarta. Buku ini mengungkapkan sejarah politik kontemporer Indonesia, khususnya masa lahirnya reformasi yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari gelanggang politik Indonesia.

2. Sumber Sekunder

B.J. HABIBIE Kisah Hidup & Kariernya, buku ini ditulis oleh A.Makmur Makka pada tahun 1995 yang diterbitkan oleh Gema Insani

Press Jakarta. Buku ini berisi tentang kisah hidup dan karier B.J. Habibie dengan keteladanannya dalam hal penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta peran-peran strategis yang dimainkannya untuk menempatkan umat pada posisi yang proporsional dalam aspek politik.

Habibie Soeharto dan Islam, buku ini ditulis oleh Adian Husaini pada tahun 1995 yang diterbitkan oleh Gema Insani Press Jakarta. Buku ini berisi tentang interaksi dari tiga pelaku politik utama (Habibie, Soeharto dan Islam) yang mempengaruhi jalannya sejarah bangsa dan masyarakat Indonesia.

Esai Politik Tentang HABIBIE, buku ini ditulis oleh Fachry Ali pada tahun 1999 yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta. Buku ini berisi tentang seorang pemimpin politik di Indonesia (Habibie) dengan basis kekuatan (politik) yang unik dan nonkonvensional: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

HABIBIE & Demokratisasi di Indonesia, buku ini ditulis oleh Bilveer Singh pada tahun 2000 yang diterbitkan oleh Cidesindo Jakarta. Buku ini berisi tentang pemerintahan pada masa Presiden B.J. Habibie, mulai dari latar belakang kehidupan B.J. Habibie, visi dan segala aspek sepak terjangnya untuk mewujudkan visinya demi kemajuan Indonesia.

E. Landasan Teori

Berkaitan dengan judul skripsi “Peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998” ini ada beberapa konsep yang perlu dipahami :

a. Peranan

Peran merupakan perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu.¹⁰ Peran: 1. pemimpin sandiwara; 2. tukang lawak pada permainan. Peranan: Sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa), misalnya tenaga-tenaga ahli dan buruh pun memegang ~ penting juga dalam pembangunan negara.¹¹

Istilah “peranan” memang dipinjam dari seni sandiwara, tetapi berbeda dengan dalam sandiwara, si pemain tidak hanya memainkan satu peranan saja, melainkan banyak peranan secara berganti-ganti, bahkan kadang-kadang sekaligus. Dalam ilmu antropologi atau ilmu-ilmu sosial lainnya, “peranan” diberi arti yang lebih khusus, yaitu peranan khas yang dipentaskan atau ditindakkan oleh individu dalam kedudukan di mana ia berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukan-kedudukan lain. Itulah sebabnya konsep peranan menurut pengertian ilmiah mengandung kenyataan bahwa si individu dari saat ke saat dapat berpindah dari satu

¹⁰ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 935

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum, Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

peranan ke peranan yang lain; bahkan jarak antara satu saat dengan saat yang lain itu dapat sedemikian dekatnya sehingga seolah-olah tampak sebagai satu saat. Hal yang tersebut terakhir ini berarti bahwa seorang individu dapat mementaskan sekaligus dua atau lebih peranan sosial pada satu saat tertentu.¹²

b. B.J. Habibie

Panggilan akrab B.J. Habibie adalah Rudy. B.J. Habibie adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Ayahnya asal Gorontalo sedangkan ibunya asal Jawa. Habibie dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Maka sejak kecil ia sudah fasih membaca Al Quran.¹³

Bacharudin Jusuf Habibie adalah manusia dengan segudang sebutan. Harian Sinar Harapan menjulukinya “Lambang abad 21”. Majalah AS, Christian Science Monitor menyebutnya “Lambang Progresivitas Islam”. Julukan Mr. Crack diberikan kalangan scientist karena B.J. Habibie adalah orang pertama di dunia yang menunjukkan cara bagaimana menghitung urutan keretakan pesawat hingga ketinggian atom-atomnya (*crack propagation on random*).

Kecemerlangannya ditunjukkan dengan berbagai penemuan di bidang konstruksi pesawat terbang yang diabadikan dengan namanya: “Teori Habibie, Faktor Habibie, dan Metode Habibie”. Reputasinya dikukuhkan pula dengan penganugerahan Theodore von Karman, hadiah

¹² Loentjaringrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000, hlm. 169

¹³ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 6 (HYMEN). Jakarta, PT. Cipta Adi Pustaka, 1989, hlm. 287

prestisius untuk dunia dirgantara, pada tahun 1993. B.J. Habibie juga dijuluki Big Spender, karena proyek-proyeknya yang padat teknologi memang mahal dan menghabiskan anggaran negara.¹⁴

Selain berkiprah di bidang teknologi, B.J. Habibie juga tercatat bermanuver di dunia politik. Jejak suami Hasri Ainun di dunia politik itu dimulai saat ia terpilih mengetuai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang bentuk tahun 1990. Banyak pengurus ICMI yang menjadi menteri atau pejabat. Beberapa pihak mencurigai ICMI berfungsi sebagai kereta politik B.J. Habibie, sekaligus alat Soeharto untuk meredam gejolak umat Islam. Nyatanya melalui ICMI, nama B.J. Habibie diperhitungkan dalam kancah politik. Ia ditunjuk Soeharto sebagai Koordinator Harian Pembina Golkar. Sidang Umum MPR Maret 1998 memilih sebagai Wakil Presiden menggantikan Jenderal Try Sutrisno. Naiknya bintang politik B.J. Habibie terjadi pada momentum yang tepat. Hanya dua bulan menjabat Wakil Presiden, krisis ekonomi dan kerusuhan massal memaksa Soeharto meletakkan jabatan, dan menunjuk B.J. Habibie menggantikan posisinya. B.J. Habibie pun tampil menjadi Presiden ketiga RI pada periode yang paling rawan secara ekonomi maupun politik.

Era kepemimpinan B.J. Habibie ditandai beberapa perkembangan positif dari sudut demokrasi, misalnya pemberian kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan pers, bahkan memberi kebebasan rakyat Timor

¹⁴ Floriberta Aning S, *100 tokoh yang mengubah dunia*, Yogyakarta, Narasi, 2006, hlm. 44

Timor memilih untuk merdeka atau tetap bergabung dengan RI. Sesuai hasil referendum, Timor pun memilih merdeka.

B.J. Habibie hanya menjabat sebagai Presiden selama setahun enam bulan. Bulan Oktober 1999, pertanggungjawaban B.J. Habibie sebagai Presiden ditolak MPR. Ia pun mundur dari dunia politik, dan mendirikan Habibie Center, sebuah lembaga swadaya masyarakat.¹⁵

c. Percaturan Politik Nasional Tahun 1990-1998

Percaturan merupakan istilah yang berarti siasat politik; perjuangan politik.¹⁶ Dan politik merupakan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah, lembaga-lembaga dan proses-proses politik, pressure groups, hubungan-hubungan internasional dan tata pemerintahan.¹⁷ Jadi politik merupakan seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup semua kebijaksanaan/tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan/pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan urusan negara.¹⁸ Sedangkan nasional yang berarti bangsa, sering diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan atau berlaku bagi seluruh warga masyarakat atau bangsa suatu negara.¹⁹ Nasional adalah yang berhubungan dengan kata Inggris nation (dari perkataan latin natio, artinya kelahiran, suku, bangsa), yang berarti

¹⁵ *Ibid.*, hal 47-48

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *op. cit.*, hal.

¹⁷ Hassan Shadily, *ensiklopedi Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984, hlm. 2739

¹⁸ A. Heuken SJ, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta, Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984, Jilid IV, Edisi ke-5, hlm. 151

¹⁹ *Ensiklopedi nasional Indonesia jilid 3*, Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 1990, hlm. 320

masyarakat yang sudah berkembang sedemikian sehingga mempunyai kesamaan sejarah, kebudayaan, bahasa dan biasanya wilayah.²⁰ Jadi percaturan politik nasional adalah siasat politik atau perjuangan politik nasional dalam suatu bangsa.

Percaturan politik nasional Indonesia pada tahun 1990-an merupakan kekuasaan orde baru. Jadi untuk membahas percaturan politik nasional tahun 1990-an, tentunya akan membahas politik orde baru. Pada masa Orde Baru terdapat kekuatan-kekuatan politik yang dapat dibedakan kedalam OPP (partai politik: PPP, Golkar, dan PDI) dan non OPP. Kekuatan non OPP antara lain adalah ABRI dan birokrat. Umat Islam secara keseluruhan, tanpa melihat organisasi formalnya, bisa pula disebut sebagai suatu kekuatan politik yang harus diperhitungkan.

Golkar adalah OPP yang terbesar yang telah memenangkan setiap pemilu dalam zaman orde baru. Golkar. Golkar sebagai OPP telah diperhitungkan sebagai kendaraan oleh ABRI dan birokrat untuk memegang kendali kekuasaan dalam pemerintahan dan mendominasi kekuasaan eksekutif di atas legislatif. Selama bertahun-tahun sejak orde baru, para birokrat dan ABRI lah yang pada hakekatnya menikmati kekuasaan, menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. ABRI tidak mungkin menjalankan itu semua sendiri, baik secara politis maupun profesional. Demikian pula birokrat tidak mungkin bekerja tanpa perlindungan kekuatan ABRI. Oleh sebab itu, ABRI, birokrat dan Golkar

²⁰ A. Heuken SJ, *op. cit.*, Jilid III, hlm. 216-217

sebagai suatu wadah politik adalah kekuatan-kekuatan politik yang tak mandiri.²¹

Sebagaimana Golkar, maka PPP dan PDI juga, pada hakikatnya adalah kepanjangan tangan dari penguasa (ABRI dan birokrat). Sebagai kepanjangan tangan, maka fungsionaris partai (ketiga OPP) dan fraksi dalam lembaga perwakilan ditentukan, secara langsung atau tidak langsung, oleh penguasa. Campur tangan penguasa ke dalam partai melalui Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina OPP dan praktek-praktek Litsus oleh Mabes ABRI adalah contoh-contoh yang menunjukkan dominasi penguasa. Dengan demikian, parpol pun tidak ada yang mandiri menyuarakan aspirasi rakyat, kecuali aspirasi dari penguasa sendiri.²²

Kekuatan Islam, sebetulnya patut memperoleh perhatian dalam proses demokratisasi. Oleh sebab itu, Islam yang menjunjung tinggi kebebasan adalah pendukung utama dari demokratisasi. Islam adalah pembela rakyat yang lemah, sehingga demokrasi adalah salah satu tujuan Islam. Pihak penguasa, khususnya ABRI, pada masa lalu melihat, bahwa kekuatan Islam sebagai kekuatan yang menakutkan dalam perebutan dominasi kekuasaan. Oleh sebab itu, selama masa orde baru, bisa diamati banyak peristiwa dan upaya yang diciptakan untuk memecah kekuatan Islam. Kekuatan Islam pada masa sekarang, hanya ada pada tingkat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Hal ini menunjukkan, bahwa Islam bukannya sesuatu yang menakutkan, tetapi kekuatan Islamlah yang akan

²¹ Sri Bintang Pamungkas, *Mahasiswa dan masa depan politik Indonesia*, Yogyakarta, PSIP DPP IMM, 1993, hlm. 100-101

²² *Idem*

menjadi pesaing bagi kekuasaan. Sulit mengharapkan dominasi akan terwujud dengan mengabaikan kekuatan Islam. Dan kekuatan Islam ada di mana-mana: di masyarakat, OPP, ABRI dan birokrat.²³

Politik Orde Baru tentunya didukung oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada, antara lain berupa OPP (partai politik: PPP, Golkar, PDI), dan non OPP (ABRI dan birokrat), selain itu umat Islam juga bisa disebut sebagai kekuatan politik nasional, karena merupakan kelompok dominasi di negeri ini.

Kemudian masih ada satu lagi kekuatan politik yang muncul hanya sewaktu-waktu, sesuai dengan situasi dan kondisi politik nasional, ialah mahasiswa. Mahasiswa yang sering kita juluki sebagai calon intelektual atau juga cendekiawan muda, merupakan suatu lapisan elit di tengah masyarakat yang sering sarat dengan berbagai predikat. Mereka sering dijuluki sebagai “*agent of exchange*” (agen perubahan) atau juga sebagai “*agent of development*” (agen pembangunan).

Inilah kekuatan-kekuatan politik yang ada pada masa Orde Baru, termasuk pada masa tahun 1990-1998, dimana terjadi banyak peristiwa politik yang sangat penting karena merupakan tahun-tahun terakhir bagi masa pemerintahan Orde Baru. Kekuatan-kekuatan politik ini juga telah memberikan warna bagi percaturan politik nasional, khususnya ditahun 1990-1998.

²³ *Ibid.*, hlm 102

Sebenarnya percaturan politik disini adalah strategi atau siasat dari kekuatan politik yang ada pada masa itu. Untuk memahani lebih jauh mengenai percaturan politik nasional tahun 1990-1998, akan dibahas pada bab II.

F. Metode dan Pendekatan

1. Metodologi

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masalampau. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut historiografi. Dengan mempergunakan metode sejarah dan historiografi sejarawan berusaha untuk merekonstruksi sebanyak-banyaknya daripada masa lampau manusia.²⁴ Metode tersebut antara lain²⁵:

- a. Pemilihan sumber untuk diselidiki
- b. Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subyek tersebut
- c. Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati-tidaknya
- d. Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya daripada sumber-sumber (atau bagian dari sumber-sumber) yang terbukti sejati.

Penelitian sejarah mempunyai 5 tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber),

²⁴ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1985, hlm. 32

²⁵ *Ibid.*, hlm. 34

(4) interpretasi: analisis dan sintesis dan penulisan.²⁶ Berikut tahap-tahap penelitian²⁷ :

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan langkah yang pertama dalam penelitian yang harus dijalankan oleh penulis agar apa yang ingin diketengahkan oleh penulis dapat lebih jelas. Untuk ini dibutuhkan kriteria sebagai acuan, yaitu :

1. Topik harus memiliki nilai, yaitu harus berdasarkan pada pengalaman manusia yang dianggap paling penting terutama peristiwa-peristiwa yang dapat membawa perubahan pada manusia.
2. Topik harus orisinal yang berarti bahwa apa yang ditulis belum pernah ditulis oleh orang lain.
3. Topik harus praktis yang berarti bahwa pemilihan topik di sini apabila dilanjutkan ke penelitian tidak memakan waktu lama.
4. Topik harus memiliki kesatuan tema dan topik di sini harus berangkat dari suatu permasalahan.

b. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Sumber sejarah yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Untuk itu maka sumber sejarah terdiri dari sumber tulisan dan lisan yang terbagi atas dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan

²⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 2001, hlm. 91

²⁷ *idem*

pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya (saksi mata). Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan.²⁸

Dalam skripsi ini penulis lebih banyak menggunakan sumber sekunder dan lebih pada studi pustaka. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui buku-buku yang ditulis oleh orang yang tidak terlibat langsung dalam suatu peristiwa dan didapatkan dari perpustakaan Sanata Dharma serta perpustakaan nasional dan perpustakaan Habibie Center Jakarta.

Sumber-sumber tersebut berupa buku-buku pustaka dan artikel-artikel majalah dan koran, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan penulis adalah buku yang mengulas perjalanan karier B.J. Habibie serta biografinya seperti *Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Habibie dari Pare-Pare Lewat Aachen.

Dalam skripsi ini penulis tidak menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan sumber, karena penulis sulit bertemu langsung dengan B.J. Habibie secara langsung.

²⁸ Louis Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 35

c. Kritik Sumber

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan sumber adalah kritik sumber. Kritik sumber ada dua macam yaitu otentisitas atau keaslian sumber atau kritik ektern dan kredibilitas atau dipercaya atau kritik intern. Penulis melakukan kritik sumber dengan cara membandingkan dan mengkaji kebenarannya serta keobjektifannya, apakah dapat dipercaya atau tidak.

Penulis sudah melakukan kritik sumber khususnya kritik intern yaitu pada sumber buku. Penulis membandingkan buku yang satu dengan buku yang lainnya, dan ternyata terdapat kesamaan dalam hal informasi yang terkandung didalamnya. Sebagai contoh buku Fachry Ali, *Esai Politik Tentang Habibie, 1999, Jakarta: Balai Pustaka* dengan buku Adian Husaini, *Habibie Soeharto dan Islam, 1995, Jakarta: Gema Insani Pres.* Kedua sumber tersebut menjelaskan bahwa bagaimana B.J. Habibie mempunyai kekuatan untuk masuk ke dalam dunia politik nasional, namun alasan yang diberikan oleh kedua sumber buku tersebut berbeda. Fachry Ali menjelaskan bahwa basis kekuatan politik B.J. Habibie terletak pada penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan Adian Husaini menjelaskan munculnya B.J. Habibie ke permukaan politik nasional karena kedekatan B.J. Habibie dengan Presiden Soeharto dan Islam yang saling berinteraksi hingga muncul basis kekuatan politik. Maka dalam

skripsi ini penulis dapat menggunakan kedua sumber tersebut sebagai bahan perbandingan agar menghasilkan tulisan yang lebih obyektif.

d. Interpretasi Data (Analisa Data)

Interpretasi sering disebut sebagai bias subyektivitas. Untuk itulah sebabnya subyektivitas sejarah diakui, tetapi untuk dihindari. Interpretasi itu ada dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan dan sintesis berarti menyatukan.

Analisis sumber dalam penelitian merupakan tahap yang sangat penting, karena dalam interpretasi terdapat unsur penafsiran terhadap sumber yang sudah dinilai kebenarannya. Hasil analisa akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini data akan ditempatkan secermat mungkin supaya penelitian mendekati keadaan yang sebenarnya. Dan dapat mampu mengurangi subyektifitas dari penulis. Sebagai contoh mengapa masa pemerintahan Presiden Soeharto pembangunan perekonomian dianggap lebih berhasil bagi rakyat Indonesia dibanding pada masa Presiden B.J. Habibie, karena pada masa pemerintahan Presiden Soeharto situasi dan kondisi politik relatif stabil dan rakyat tidak merasakan penderitaan. Sedangkan masa Presiden B.J. Habibie situasi politik sangat kacau dan banyak rakyat yang menderita karena kemiskinan.

e. Penulisan Sejarah (historiografi)

Penulisan sejarah tidak lepas dari sumber-sumber yang terkait didalamnya, yang memberikan gambaran mengenai rangkaian suatu

peristiwa. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis suatu peristiwa sangat penting, sehingga dapat lebih mudah mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi.

Penulisan sejarah ini dilakukan setelah melalui beberapa kriteria yang telah tercantum dalam metode penulisan sejarah. Metode tersebut antara lain pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Di samping itu penelitian ini mencakup beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh penulis, antara lain: topik, latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian dan daftar pustaka.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode deskripsi analitis. Masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana percaturan politik nasional tahun 1990-1998, masalah kedua apa yang menjadi faktor pendorong B.J. Habibie memasuki percaturan politik nasional tahun 1990-1998, masalah ketiga bagaimana aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998, keempat apa peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998.

2. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan politik dan pendekatan psikologi. Pendekatan politik digunakan untuk membaca kekuasaan politik B.J. Habibie dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan serta bagaimana kekuasaan tersebut berakhir. Salah satu kajian politiknya dapat dilihat dari pemerintahan Presiden B.J. Habibie selama 17 bulan.

Sedangkan pendekatan psikologi digunakan untuk membaca tingkah laku seseorang. Tingkah laku manusia timbul karena adanya suatu kebutuhan dan tingkah laku manusia tersebut mengarah pada pencapaian tujuan yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan tersebut. Kebutuhan karena adanya ketidakseimbangan di dalam diri individu membuat individu yang bersangkutan melakukan suatu tindakan, tindakan itu mengarah pada suatu tujuan, tujuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Bila kebutuhan yang pertama sudah terpenuhi, akan terjadilah keadaan tidak seimbang pada taraf yang lebih tinggi; keadaan ini menimbulkan kebutuhan baru dan seterusnya, sehingga manusia boleh dikatakan tidak pernah diam.²⁹

Pendekatan psikologi ini penulis gunakan untuk mengkaji biografi dari B.J. Habibie. Melalui pendekatan psikologi ini, penulis menguraikan sifat dasar dari B.J. Habibie. Dalam biografi B.J. Habibie tersebut penulis menguraikan sifat dasar beliau yang semula memiliki kepribadian sebagai

²⁹ Martin Handoko, *Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku*, Yogyakarta, Kanisius, 1992, hlm. 19

ahli teknologi mengalami perubahan menjadi seorang politikus yang dikenal dengan manuver-manuvernya. Perubahan sifat dasar B. J. Habibie ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pendidikan yang tinggi dan segala prestasi yang diraihinya dalam bidang teknologi, pergaulan yang berada di kalangan pemerintahan dan terlibat dalam perpolitikan nasional, serta kondisi dan situasi rakyat Indonesia yang memprihatinkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, memaparkan secara garis besar peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990 sampai 1998. Adapun kerangka penulisan ini adalah :

Bab I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Percaturan politik nasional tahun 1990-1998

Bab III : Faktor pendorong B. J. Habibie memasuki percaturan politik nasional tahun 1990 sampai 1998.

Bab IV : Aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998

Bab V : Peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998.

Bab VI : Penutup

BAB II

PERCATURAN POLITIK NASIONAL TAHUN 1990-1998

Percaturan politik pada bab ini dipahami sebagai strategi atau siasat yang dilancarkan oleh masing-masing kekuatan politik yang ada. Strategi dari kekuatan politik tersebut telah memberikan warna bagi perpolitikan Orde Baru, termasuk pada tahun 1990-1998. Untuk itu, bab ini akan membahas secara umum mengenai kekuatan-kekuatan politik pada tahun 1990-1998 serta strategi atau siasat yang dilancarkannya.

A. Kekuatan-Kekuatan Politik Nasional Tahun 1990-1998

Seperti yang telah disinggung dalam landasan teori, mengenai kekuatan-kekuatan politik yang ada bahwa kekuatan politik tersebut telah memiliki strategi atau siasat masing-masing di dalam mengisi percaturan politik nasional, khususnya ditahun 1990-1998. Untuk itu akan dibahas secara umum kekuatan-kekuatan politik tersebut, beserta strategi atau siasat yang dilancarkan dalam mewarnai percaturan politik nasional ditahun 1990-1998. Kekuatan-kekuatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. OPP (Organisasi Peserta Pemilu), antara lain adalah PPP, Golkar, dan PDI.

Partai politik yang ada pada masa Orde Baru terdiri dari Partai Golkar, PPP, PDI. Semuanya merupakan Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang memiliki kekuatan politik pada masa Orde Baru. Pertama

partai Golkar, dimana partai ini merupakan “wadah politik” pemerintahan Soeharto sehingga partai ini dikembangkan menjadi partai politik peserta pemilu.

Partai Golkar ini didalamnya terdapat tiga jalur, masing-masing jalur A yaitu ABRI, jalur B yaitu Birokrat dalam hal ini adalah Korps Pegawai Negeri RI atau Korpri³⁰ dan jalur G yaitu seluruh jajaran anggota Golkar di luar ABRI dan KORPRI lengkap dengan Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang serta Dewan Pembina dimana ketuanya adalah Presiden Soeharto sendiri.³¹

Andalan utama Golkar adalah pemerintah pada masing-masing tingkat pemerintahan. Jauh sebelum pemilihan umum telah diterapkan suatu Undang-Undang untuk menjadikan aparat pemerintahan desa sebagai pegawai negeri. Jika dihubungkan dengan upaya menggalang solidaritas masa di desa, penerapan Undang-Undang ini jelas berkaitan dengan upaya mengikat pimpinan desa untuk ikut melicinkan jalan bagi menangnya Golkar dalam pemilihan di desa-desa. Tampaknya Golkar menyadari bahwa jalan satu-satunya untuk mengikat masa di desa hanya bisa ditempuh melalui jalinan struktural melalui lembaga desa. Dengan

³⁰ KORPRI; Korps Pegawai Republik Indonesia didirikan pada tanggal 29 November 1971 sebagai wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai negeri di kedinasan dengan tujuan, disamping meningkatkan mutu para anggota serta membina watak dan jiwa pengabdian, juga memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial. Tujuan yang seperti yang disebut inilah yang merupakan komitmen dari setiap anggota KORPRI untuk selalu setia kepada Golkar. (Tuk Setyohadi, *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa ke Masa*, Jakarta, CV. Rajawali Corporation, 2002, hlm. 142)

³¹ Tuk Setyohadi, *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa ke Masa*, Jakarta, CV. Rajawali Corporation, 2002, hlm. 142.

dipegawainegerikannya aparat desa, Golkar jelas dapat menanamkan pengaruhnya melalui wadah KORPRI.³²

Kedua, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai ini jelas mengandalkan kekuatannya dalam menggalang massa didasarkan atas hubungan emosional keagamaan. Primordialisme agama adalah menjadi lem perekat antara massa dengan elite politik.

Ketiga, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), partai ini tidak memiliki ideologi sentral sebagaimana PPP dengan Islamnya, yang dapat dijadikan alat pengikat solidaritas yang bisa diterima oleh semua kelompok karena dulunya PDI memiliki ideologi berbeda-beda.³³ Hal ini disebabkan PDI merupakan gabungan atau himpunan dari beberapa partai. Kemudian ditahun 1990 PDI mulai memainkan perannya dengan giat di dalam politik nasional, dengan dibuktikannya melalui Pemilu tahun 1999 PDI dapat meraih suara terbanyak.

2. ABRI

Selain OPP, masih ada ABRI dimana telah memiliki kekuatan politik yang sangat berpengaruh, khususnya di tahun 1990. Pada masa Orde Baru peran Dwi Fungsi ABRI lebih ditingkatkan khususnya dalam berbagai mekanisme ketatanegaraan baik dibidang eksekutif, legislatif,

³² Drs. M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983, hlm. 200

³³ PDI menghimpun lima buah partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Partai Katholik dan partai Kristen Indonesia (PARKINDO). Hal ini yang membuat PDI tidak memiliki ideologi sentral. (lihat Drs. M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983, hlm. 173)

maupun yudikatif dan bahkan sampai ke dunia bisnis, terutama dalam perusahaan-perusahaan BUMN.³⁴

Keterlibatan ABRI dalam politik erat kaitannya dengan Dwi Fungsinya. Masalah ini telah banyak mendapat sorotan oleh para ahli/pengamat ilmu politik, baik dari dalam maupun dari luar. Salah satunya pendapat yang sangat menarik, dikemukakan oleh Ulf. Sundhaussen bahwa “kaum sipil memikul tanggung jawab besar terhadap pengambil-alihan kekuasaan politik oleh kaum militer”, atau dengan kata lain “naiknya kaum militer dalam panggung kekuasaan adalah disebabkan oleh ketidakmampuan lembaga sipil sendiri untuk mencegah dan mengatasi krisis.

Kemudian T.B. Simatupang dengan sudut pandang yang agak berbeda dengan mengajukan tiga alternatif dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dengan mengawinkan stabilitas serta pembangunan ekonomi dan industri dengan pengamalan semua sila dari Pancasila. Disinilah letak ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator. Lebih dari itu menurut Simatupang, ABRI dalam melaksanakan tugasnya itu bukan hanya menyangkut ABRI saja, “melainkan termasuk salah satu permasalahan nasional kita yang akan ikut menentukan sifat dan arah perkembangan dan serta pertumbuhan kita sebagai bangsa dan negara di waktu yang akan datang”. Kiranya dapat dipahami jika hampir

³⁴ Lihat buku Tuk Setyohadi, *op. cit.*, hlm. 144

di semua eselon pemerintahan, di lembaga legislatif dan juga dilembaga-lembaga sosial swasta kita temukan ABRI.³⁵

Kemudian kaum cendekiawan di masa Orde Baru yang biasa disebut “teknokrat” di dalam politik juga tak bisa dilepaskan dari peranan ABRI tersebut. Ia dijadikan ABRI sebagai partner dalam membawa misi yang hendak dijalankan ABRI dalam rangka pembangunan bangsa.

Di lain pihak, bersamaan dengan itu kehadiran Golkar, yang oleh beberapa pengamat dikatakan sebagai perpanjangan tangan ABRI di lembaga sipil – semakin mendesak kedudukan partai politik. Badan baru ini jelas memberi peluang bagi ABRI untuk terjun langsung dalam politik praktis. Kenyataan menunjukkan bahwa pada mulanya semua atau setidaknya sebagian besar pimpinan teras Golkar di masing-masing tingkat dipimpin oleh ABRI yang masih aktif dalam kesatuannya masing-masing. Baru di tahun-tahun terakhir ini saja pimpinan tersebut diharuskan menanggalkan baju militernya dengan pensiun terlebih dahulu sebelum diterjunkan ke dalam Golkar. Dengan uraian ini dapat dipahami bahwa sebenarnya Golkar pun di dominasi oleh ABRI.³⁶

3. Umat Islam

Islam pada tahun 1990 mulai terlihat kembali peranannya dalam politik nasional, karena sebelumnya pada masa Orde Baru di tahun 1970 sampai tahun 1980 kekuatan Islam diredam oleh kekuatan militer, karena

³⁵ Drs. Rusli Karim, *op. cit.*, hlm. 162

³⁶ *Ibid.*, hlm. 164

dianggap mengganggu pemerintahan Soeharto. Kekuatan Islam sebetulnya patut diperhitungkan karena Islam merupakan pendukung utama dari demokrasi. Sehingga sulit mengharapkan demokrasi akan terwujud dengan mengabaikan kekuatan Islam, selain itu kekuatan Islam juga ada dimana-mana, misalnya masyarakat, OPP, ABRI dan birokrat.³⁷

Hal inilah yang membuat Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru ternyata mengakui juga potensi Islam yang tak terbantahkan. Dengan kata lain, lepas dari upaya meminggirkan politik Islam, Soeharto membutuhkan dukungan dari kalangan Islam. Menurut banyak pengamat, pembentukan ICMI yang ternyata mendapatkan dukungan penuh Soeharto itu adalah kenyataan dari merasa perlunya Soeharto terhadap dukungan dari kalangan Islam. Ini adalah bagian dari strateginya untuk memenangkan atau untuk memuluskan keinginannya menjadi Presiden pada periode berikutnya.

Meskipun ICMI bukan ide orisinal dari Soeharto, ia telah berhasil menempatkan para birokrat sebagai pemimpin ICMI, sehingga dengan demikian Soeharto dapat mengendalikannya. Ini berarti Soeharto akan mendapat dukungan atau simpati balik dari kalangan Islam.³⁸

Akan tetapi perlu dicatat bahwa umat Islam melalui ICMI juga mempunyai agenda politik meskipun mengklaim sebagai organisasi yang non-politikal (bukan organisasi politik) , organisasi cendekiawan

³⁷ Baca buku berjudul *Mahasiswa dan Masa Depan Politik Indonesia*, penerbit PSIP DPP IMM, Yogyakarta, 1993, hlm. 102

³⁸ Taufik Abdullah, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 372 - 373

Islam telah memiliki tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan dari dekatnya hubungan dengan pemerintah Soeharto. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, Soeharto dan ICMI (umat Islam) adalah dua pihak yang saling membutuhkan dan keduanya sekaligus memperoleh keuntungan.

4. Mahasiswa

Sebenarnya masih ada satu lagi yang merupakan kekuatan politik yang tak terduga oleh pemerintahan Orde Baru, terutama muncul ketika peristiwa Reformasi tahun 1997-1998, yaitu mahasiswa. Kekuatan mahasiswa perlu diperhitungkan, hal ini dapat kita lihat dari kekuatan politik mahasiswa ketika membuat aksi demo menentang pemerintahan Soeharto tahun 1997/1998.

Sebenarnya isu yang paling menarik pada awal dekade tahun 1990-an adalah menyangkut masalah demokratisasi kehidupan politik. Dalam kaitan untuk merealisasikan terciptanya kehidupan politik yang semakin demokratis tersebut, tentu bukan hanya menjadi tugas partai politik, meskipun ia harus memainkan peran yang penting, melainkan menjadi tugas mulia seluruh komponen masyarakat, terutama tentu saja adalah mereka para generasi muda yang terdidik, yakni para mahasiswa.

Hal ini dapat diamati dari setiap aksi para mahasiswa, khususnya di tahun 1997/1998, dimana terjadi ketidakstabilan kondisi ekonomi dan politik Indonesia. Terhadap kondisi ekonomi yang timpang dan mendatangkan penderitaan kepada masyarakat yang luas itu, mahasiswa

meneriakkan keprihatinannya lewat aksi politik di kampus-kampus. Dan terhadap kekeliruan serta kegagalan politik tersebut, mahasiswa menuntut dilaksanakan reformasi politik secara mendasar dan dalam waktu yang relatif singkat.

Tetapi pemerintah bereaksi secara kontradiktif terhadap tuntutan dan aksi mahasiswa tersebut. Petugas keamanan menilai, aksi mahasiswa dapat mengganggu kestabilan politik dan keamanan. Mereka juga mengingatkan bahwa tugas mahasiswa sebagai generasi penerus adalah belajar untuk mempersiapkan diri.

Menteri Pendidikan dan kebudayaan (P dan K) menuding bahwa aksi mahasiswa telah berpolitik praktis di kampus. Mahasiswa dianggap melakukan pelanggaran larangan berpolitik praktis, disamping menghadapi sarana pendidikan pada resiko kerusakan. Lalu menteri P dan K memerintahkan pimpinan lembaga pendidikan untuk menghentikan aksi mahasiswa atau mengendalikannya.

Namun, tak semua pimpinan lembaga pendidikan tinggi menerima argumentasi pemerintah tersebut. Sejumlah rektor, seperti Rektor Universitas Gadjah Mada dan Rektor Universitas Indonesia, menilai bahwa aksi mahasiswa adalah wajar dan tak tergolong ke dalam tudingan pemerintah tersebut. Memanfaatkan kontroversi itu untuk memperjuangkan keyakinan akan tuntutan, gerakan politik

mahasiswa meluas ke seluruh kampus.³⁹ Demikian strategi yang dilancarkan oleh mahasiswa, yaitu dengan aksi-aksi di dalam kampus dan meluas ke kampus-kampus serta meluas keluar kampus.

Demikian kekuatan-kekuatan politik Orde Baru, khususnya di tahun 1990-1998. Sehingga jika kita pahami kekuatan-kekuatan tersebut mempunyai peran dan proporsi yang berbeda-beda dalam percaturan politik nasional sesuai dengan tujuannya.

B. Politik Orde Baru Tahun 1990-1998

Untuk memahami percaturan politik nasional tahun 1990-1998, maka perlu dipahami terlebih dahulu politik pada masa Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru, yang dikuasai oleh Presiden Soeharto dimulai pertengahan 1965 sampai tahun 1998. Pemerintahan Orde Baru dapat dikatakan pemerintahan yang cukup lama.

Dalam awal mengemban tugasnya sebagai Pejabat Presiden pada saat negara sedang terpuruk baik secara politis ataupun ekonomis, Soeharto menerapkan suatu strategi yang berbeda dari yang dianut oleh kebanyakan Kepala Negara/Pemerintahan yang biasanya bertumpu pada kekuatan partai politik. Strategi Soeharto bertumpu pada dua kekuatan yang dapat diandalkan yakni ABRI/TEKNOKRAT, yang dipadukan dalam suatu “*civilian-military administrative structure*” (struktur administrasi sipil-militer).

³⁹ Dedy Djamiluddin, *Gejolak Reformasi Menolak Anarki*, Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1998, hlm. 36

Dalam struktur seperti yang dimaksud di atas, Soeharto dengan otoritas yang kuat pada dirinya, melakukan sistem pendelegasian wewenang kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang profesional yang dapat dipercaya loyalitasnya untuk memimpin instansi atau institusi dalam pemerintahan yang posisinya strategis. Dengan demikian Soeharto sebagai Presiden terjamin berada di belakang kemudi bahtera pemerintahan yang solid.⁴⁰

Kemudian Soeharto mulai menyusun sistem politik guna lebih memantapkan kekuasaan. Orde Baru sejak semula menandakan bahwa kegagalan pemerintah Orde Lama dalam menganut Demokrasi Terpimpin perlu dikoreksi dengan tekad untuk kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen inilah yang kemudian dituangkan dalam sistem yang dinamakan Demokrasi Pancasila, dimana Presiden Soeharto mengukuhkan segala langkah dan tindakannya dalam produk perundang-undangan, sehingga selalu dapat dipertanggung jawabkan secara konstitusi.

Selanjutnya pada masa Orde Baru, dilakukan beberapa strategi lainnya, antara lain adalah pertama, menjadikan Golongan Karya (Golkar) sebagai “wadah politik” yang dapat mempertahankan eksistensi Pemerintahan Presiden Soeharto. Golkar⁴¹ secara legal bukan partai politik namun

⁴⁰ Tuk Setyohadi, *op. cit.*, hlm. 137

⁴¹ Golongan Karya: Pada masa Demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Orde Lama, terdapat dua kubu politik yang saling berhadapan yaitu PKI dan TNI-AD dengan masing-masing organisasi tandingannya. Untuk menghimpun berbagai Ormas non partai sebagai kekuatan untuk menghadapi PKI, maka TNI-AD membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya disingkat

menjalankan fungsi sebagai partai politik, diberi preferensi oleh pemerintah Orde Baru sebagai mesin politik penggalang legitimasi bagi pemerintahan lima tahunan yang baru, dengan tampil sebagai pemenang pada setiap pemilu. Kedua, Presiden Soeharto meningkatkan peran Dwi Fungsi ABRI dalam berbagai mekanisme ketata-negaraan baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan bahkan sampai ke dunia bisnis, terutama dalam perusahaan-perusahaan BUMN.⁴²

Inilah strategi atau siasat yang digunakan Soeharto, supaya melanggengkan pemerintahannya dan terhindar dari kesalahan yang berdasarkan konstitusi. Jika kita amati bahwa pemerintahan Orde Baru bisa menjaga kekuasaannya cukup lama dikarenakan bertahannya aliansi strategi Orde Baru di antara Presiden, militer, birokrasi, teknokrat dan pemodal. Dan pada tahun 1997 kekuasaan ini mulai tergoyahkan dan keretakan secara serius ketika krisis ekonomi dan politik yang sangat parah dengan politisasi dan radikalisme mendadak mahasiswa.

C. Posisi B.J. Habibie Dalam Percaturan Politik Nasional Tahun 1990-1998

Penulisan ini berbicara tentang peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional, khususnya pada tahun 1990-1998. Sehingga sebelum memahami peranan B.J. Habibie yang akan dibahas pada bab berikutnya, tentunya harus memahami posisi B.J. Habibie dalam percaturan politik Orde Baru sampai tahun 1998.

Sekber Golkar pada tanggal 20 Oktober 1964. (lihat buku Tuk Setyohadi, *op. cit.*, hlm. 141 dan Drs. Rusli Karim, *op. cit.*, hlm. 160)

⁴² *Ibid.*, hlm. 144

Masa pemerintahan Soeharto terdapat beberapa kekuatan politik, salah satu kekuatan politik tersebut telah memberikan keuntungan bagi pemerintahan Soeharto di dalam mempertahankan kekuasaannya, kekuatan tersebut ialah Golkar. Di dalam tubuh Golkar inilah B.J. Habibie berada, selama menjabat sebagai Menristek sudah menjadi anggota dari Golkar. Sampai pada tahun 1992 dan 1993, B.J. Habibie mendapatkan kedudukan penting dalam tubuh Golkar, yaitu sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar. Hal ini tentu saja memberikan pengaruh besar bagi B.J. Habibie dalam sepak terjangnya pada masa pemerintahan Orde Baru.

Kemudian ditahun 1990, pemerintahan Soeharto mulai merangkul umat Islam yang ditandai dengan dukungan dan izin berdirinya organisasi ICMI. Dan B.J. Habibie juga ditunjuk sebagai Ketua Umum ICMI, hal ini tentunya sangat menguntungkan pemerintahan Soeharto, karena B.J. Habibie adalah salah satu orang kepercayaan Soeharto dalam pemerintahan.

Dari setiap situasi politik di atas, dapat kita amati posisi B.J. Habibie di dalam percaturan politik nasional. Yang pertama berada dalam tubuh Golkar, kedua B.J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI, dimana dapat merangkul umat Islam, khususnya para cendekiawan Muslim. Yang ketiga B.J. Habibie pada tahun 1998 dan 1999, B.J. Habibie dipercaya menjabat sebagai Wakil Presiden dan Presiden RI. Keterlibatan inilah yang akan kita bahas dalam bab-bab berikutnya, di mana B.J. Habibie telah memberikan peranannya dalam peraturan politik nasional pada tahun 1990-1998.

BAB III

FAKTOR PENDORONG B.J. HABIBIE MEMASUKI PERCATUREAN POLITIK NASIONAL

B.J. Habibie masuk dalam percaturan politik dapat dilihat secara mencolok pada tahun 1990, ketika B.J. Habibie terpilih sebagai Ketua Umum ICMI. Kemudian ditambah lagi pada tahun 1993, B.J. Habibie menjabat sebagai Koordinator Harian Pembina Golkar. Masuknya B.J. Habibie ke dalam percaturan politik tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Kedekatan B.J. Habibie dengan Soeharto sebagai Presiden RI

Kemampuan B.J. Habibie untuk menggapai jabatan politik tertinggi sebagian juga didukung oleh kenyataan bahwa di awal dasawarsa 1990-an ia telah muncul sebagai orang kepercayaan Presiden Soeharto. Kenyataan bahwa sudah sejak lama berlangsung hubungan pribadi, dimulai di tahun-tahun awal 1950-an, ikut membantu munculnya kepercayaan itu.⁴³

Hubungan Soeharto dengan keluarga B.J. Habibie sudah terjalin sejak tahun 1950. Pada saat itu, Letkol Soeharto memimpin Brigade Ekspedisi Divisi Diponegoro dengan nama Brigade Mataram untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Markas Brigade terletak di jalan

⁴³ Bilveer Singh, *Habibie dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta, Cidesindo, 2000, hlm. 34

Klaperlaan yang terletak di Makasar, di mana jalan tersebut merupakan rumah tinggal keluarga B.J. Habibie.

Dalam rangka memperingati setengah abad umur B.J. Habibie, Presiden Soeharto menulis, “Dalam operasi teritorial menggalang persatuan dengan rakyat, segenap anggota brigade selalu berhubungan dengan rakyat dalam rangka manunggal dengan rakyat, selalu mengadakan anjongsana pada rakyat lebih-lebih pada hari libur. Anggota staf brigade juga sangat erat hubungannya dengan penduduk di sekitar markas. Di antara penduduk di sekitar markas Brigade Mataram di jalan Klaperlaan itu adalah keluarga B.J. Habibie.”

Presiden Soeharto mengisahkan, pada suatu hari di tengah malam, ketika anggota staf brigade tidur nyeyak, anak-anak keluarga B.J. Habibie datang ke asrama sambil menangis. Mereka memberitahu bahwa ayahnya sakit keras. Segera Soeharto berangkat ke rumah mereka bersama dokter Irsan. “Alwi Abdul Jalil bapak dari B.J. Habibie terkena serangan jantung dan tidak tertolong lagi. Menghembuskan nafas terakhir di depan saya, dokter Irsan, dan keluarga B.J. Habibie. Saya berkesempatan menutup matanya sambil memohon ampun pada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tulis Presiden.⁴⁴

Kemudian dalam tulisan yang dibuat B.J. Habibie yang berjudul “Mengenai Pak Harto dari Dekat Selama 41 Tahun”, ditulis dalam rangka memperingati 70 tahun usia Soeharto, B.J. Habibie mengakui bahwa ia pertama kali melihat Soeharto di tahun 1950, ketika ia sendiri baru berumur 13

⁴⁴ Adian Husaini, *op. cit.*, hlm. 60

tahun di Ujung Pandang. Soeharto sering dilihatnya bersama beberapa bawahannya dalam Brigade Garuda Mataram.

Usia Soeharto ketika itu diperkirakan sekitar 28-29 tahun. Kepada pemuda pimpinan Brigade Mataram itu yang bemarkas hanya berseberangan jalan dengan rumah keluarganya, B.J. Habibie selalu memandang kagum, baik dalam sikap pemuda Soeharto sebagai pemimpin pasukan maupun pembawahannya sehari-hari. Bayangkan, di tahun-tahun awal kemerdekaan bangsa Indonesia, anak-anak mana yang tidak menyimpan rasa kebanggaan dan kekaguman jika tentara-tentara Indonesia dengan perkasa menyangand senjata atau berjalan di tengah-tengah kota.

B.J. Habibie yang baru dalam usia beranjak dewasa tidak lepas dari perasaan-perasaan kagum seperti ini, sebagaimana ditulisnya “dari sudut penglihatan saya sebagai anak kecil berumur 13 tahun, Soeharto seorang idola yang patut di contoh setiap orang, setidaknya setiap anak kecil seumur saya yang mampu berpikir dan berperasaan hati nurani yang dekat dengan keluarganya, lingkungannya dan bangsanya”. Perasaan kagum itu bercampur dengan rasa haru bagi B.J. Habibie ketika pada tahun 1950 ayahnya mendapatkan serangan jantung sewaktu shalat Isya. B.J. Habibie mengungkapkan perasaannya di saat peristiwa tersebut sebagai berikut: “Semua yang terjadi di tahun 1950 itu masih jelas di bayangan saya bagaimana suatu skenario yang tertanam di dalam otak dan hati nurani saya. Waktu itu saya berdiri di belakang ayah yang bertindak selaku imam. Dengan mata kepala sendiri saya melihat ayah terjatuh, dan dengan ucapan “Allahu

Akbar, Allahu Akbar” ayah saya mengakhiri hidupnya. Dan masih jelas dalam ingatan B.J. Habibie bagaimana Soeharto menutup mata ayahnya kemudian mendoakan serta menghibur ibunya dan seisi rumah dan berusaha meyakinkan agar menerima musibah itu dengan tabah.

B.J. Habibie mengakui di situlah mulai hubungan antara pribadi B.J. Habibie dengan pribadi Soeharto terpatrit menjadi hubungan batin yang sangat erat. Pada saat meninggalnya ayah B.J. Habibie di tikar sembahyang itulah terbentuknya hubungan batin yang ditakdirkan Tuhan. Perasaan inilah yang sampai hari ini diakui oleh B.J. Habibie merupakan bekal yang diberikan Tuhan padanya dalam hubungan dengan Soeharto sebagai manusia, sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin bangsa dan umat manusia.⁴⁵

Hubungan Soeharto dengan keluarga B.J. Habibie semakin dekat setelah seorang perwira Brigade Mataram, Kapten Subono, menikah dengan kakak B.J. Habibie. “ Konsekuensinya, saya sebagai komandan Brigade berbesanan dengan Ibu B.J. Habibie, “ tulis Presiden Soeharto.

Pada tahun 1961, saat menjabat Deputy I KSAD, Soeharto bertemu dengan B.J. Habibie di Jerman. Hubungan yang sejak lama terjalin terus dipelihara. Di bagian lain, mengenai saat-saat kelahiran Orde Baru pada tahun 1966, Presiden Soeharto menulis, “ B.J. Habibie merasa terpanggil untuk mengabdikan pada negara dan bangsa. Melalui iparnya, Kolonel Subono, ia melaporkan kepada saya siap kembali ke tanah air.⁴⁶

⁴⁵ A. Makmur Makka, *op. cit.*, hlm. 113-114

⁴⁶ Adian Husaini, *op. cit.*, hlm. 61

Kemudian pada tahun 1974 B.J. Habibie dipanggil pulang ke Indonesia, sehingga jabatan sebagai Wakil Presiden dan Direktur Teknologi MBB (Messerschmitt-Bolkow-Blohm) di Jerman harus ditinggalkannya, namun tetap diminta menjadi penasehat perusahaan tersebut. Pada tahun 1978, B.J. Habibie diangkat menjadi Menristek pada kabinet pembangunan III dan berbagai jabatan-jabatan lainnya.

Kepercayaan Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie tidak hanya pada bidang teknologi saja tetapi juga pada bidang politik. Pada tahun 1993, ketika diselenggarakan Munas Golkar, B.J. Habibie disertai jabatan penting sebagai Koordinator Harian Ketua Dewan Pembina Golkar. Kemudian ditahun 1990, karena tingkat pergaulan B.J. Habibie yang semakin luas dan semakin dikenal oleh berbagai kalangan, ia juga disertai jabatan Ketua Umum ICMI oleh umat Islam yang telah mendirikan organisasi tersebut. Sampai pada tahun 1998 dan 1999, B.J. Habibie menjabat Wakil Presiden dan Presiden Indonesia.

Jabatan-jabatan politik tersebut sangat dipengaruhi oleh kedekatan B.J. Habibie dengan Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru. Hal ini sangat mencolok ketika B.J. Habibie disertai jabatan sebagai Koordinator Harian Ketua Dewan Pembina Golkar ditahun 1993, dimana posisi B.J. Habibie awalnya hanya sebagai ahli teknologi dan bukan sebagai orang yang memiliki basis kekuatan politik atau berlatar belakang politik, lalu bagaimana jabatan penting tersebut dapat dimilikinya. Sehingga jelas bahwa kedekatan B.J. Habibie dan Presiden Soeharto merupakan salah satu pendorong bagi B.J. Habibie untuk memasuki percaturan politik nasional.

Kemudian ada satu hal lagi yang lebih menguatkan, dimana Soeharto melibatkan anak didiknya yaitu B.J. Habibie di dalam dinamika lingkaran Islam di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat ketika Soeharto memberi restu dan ijin sepenuhnya kepada B.J. Habibie untuk menjabat sebagai Ketua Umum ICMI, di mana organisasi tersebut dibangun oleh para tokoh Islam yang berpengaruh dalam kehidupan politik Islam di Indonesia, misalnya Dr. Imaduddin Abdurrahim, Dr. Nurcholish Madjid, dan Dawam Raharjo yang ingin memperjuangkan kehidupan Islam di Indonesia. Dengan begitu Soeharto lewat B.J. Habibie dapat merangkul umat Islam yang merupakan kelompok dominan dan mempunyai kekuatan politik besar, sehingga tercipta kestabilan politik yang telah dibangun oleh Soeharto. Sedangkan kita tahu bahwa B.J. Habibie merupakan salah satu menteri di bawah kewenangan Soeharto, lalu bagaimana mungkin tanpa kedekatan dan kepercayaan Soeharto dengan B.J. Habibie, sehingga B.J. Habibie mendapat ijin untuk menjabat Ketua Umum ICMI, di luar kegiatan sebagai menteri.

Jadi dapat kita amati, bahwa kedekatan B.J. Habibie dengan Soeharto merupakan hubungan relasi yang mendorong B.J. Habibie memasuki percaturan politik. Hal ini tentu bisa kita lihat melalui perkenalan awal Soeharto dengan keluarga B.J. Habibie, jabatan-jabatan yang dimiliki B.J. Habibie, ijin untuk memimpin ICMI, serta kepercayaan menyerahkan jabatan strategis pada partai Golkar. Dari sini tentu kita dapat memberikan kesimpulan bahwa pada masa kekuasaan Soeharto, B.J. Habibie berada di posisi yang menguntungkan bagi Pemerintahan Soeharto dan sebaliknya menguntungkan

B.J. Habibie sebagai pendorong untuk masuk dalam percaturan politik nasional.

B. Nasionalisme B.J. Habibie Muda

Memang banyak orang menganggap B.J. Habibie sekarang kurang memiliki sikap nasionalis, karena hal ini dapat kita lihat dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkannya ketika menjabat sebagai Presiden, dimana B.J. Habibie telah dianggap melepaskan Timor-Timur. Selain itu juga B.J. Habibie lebih sering tinggal di Jerman dari pada di Indonesia. Tetapi ketika B.J. Habibie masih muda, dimana ia tinggal dan dibesarkan di Indonesia pada masa kemerdekaan dan masih berlangsung peperangan, hal ini tentu memberikan sikap kecintaannya terhadap Indonesia untuk bisa bebas dari penjajah dan peperangan. Sehingga nasionalisme B.J. Habibie muda tentu mempengaruhi perjalanan kariernya.

B.J. Habibie muda telah terbukti sebagai seorang yang nasionalis. Hal ini dapat dilihat dari B.J. Habibie muda ketika dikirim ke Jerman oleh seorang ultra-nasionalis seperti Soekarno dan Mohd. Yamin, dari awal B.J. Habibie muda telah terilhami oleh gagasan untuk mengangkat negaranya dari keterbelakangan. Di kemudian hari ia mengatakan kepada Presiden Soeharto bahwa di awal 1950, terutama antara 1954-1956, Presiden Soekarno memerintahkan agar pemuda-pemuda pergi ke luar negeri untuk belajar, lalu pulang kembali guna membantu Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka dan mandiri. Itu merupakan hal yang berpengaruh besar atas diri B.J.

Habibie. Namun yang terpenting, walau telah mencapai posisi yang terhormat di luar negeri, ia masih tetap memilih pulang untuk mengabdikan kepada negerinya, hal ini merupakan bukti kenasionalan, kesetiaan dan kepatriotannya.⁴⁷

Dalam proses persiapan keberangkatan ke Jerman, B.J. Habibie muda bertemu dengan Mohd. Yamin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Sambil mengelus-elus kepala B.J. Habibie ia berkata “Kamu ini harapan bangsa”. Walau tentu tidak bisa kita tafsirkan secara tepat, melihat suasana jaman yang baru lepas dari penjajahan, ucapan semacam itu tidak lain adalah refleksi dari semangat kebangsaan. Dalam konteks tertentu, bahkan ucapan ini lebih mempunyai makna spesifik, karena kalimat ini keluar dari mulut Mohd. Yamin sendiri. Mohd. Yamin, kita ketahui bersama, adalah salah seorang tokoh nasionalis terkemuka pada saat itu.⁴⁸

Ucapan Mohd. Yamin itu memberi bekas pada B.J. Habibie, ini bukan saja terlihat pada fakta bahwa kalimat tersebut tak lekang dari ingatannya – kendati telah terlewati selama lebih dari 40 tahun. Tetapi, juga terlihat pada sebuah sajak yang dikarangnya ketika B.J. Habibie muda terlentang di kamar sebuah klinik Universitas Bonn karena terkena serangan influenza yang virusnya masuk ke jantung. Dalam sajak itu mengeluh atas penderitaan perasaan perih dan kesal. Namun, keluhan itu tampaknya tak ditujukan pada penderitaan sakit fisiknya, tetapi karena ketakberdayaannya untuk berbuat

⁴⁷ Bilveer Singh, *op. cit.*, hlm. 32

⁴⁸ Fachry Ali, *Esai Politik Tentang Habibie*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hlm 120

sesuatu yang diperuntukkan kepada apa yang disebutnya Ibu Pertiwi. Berikut sajak yang ditulis oleh B.J. Habibie muda :

*Terlentang !!!
Djatuh! Perih! Kesal!
Ibu Pertiwi
Engkau pegangan
Dalam perjalanan
Djandji pusaka dan sakti
Tanah tumpah darahku
Makmur dan sutji*

Jika ditelusuri latar belakang kelahiran sajak tersebut di atas sedikit lebih jauh, kita bisa mendapatkan fakta lebih banyak tentang pengaruh semangat nasionalis dari kalimat Mohd. Yamin tersebut yang membekas dalam struktur keyakinan B.J. Habibie muda. Ini terjadi pada tahun 1959, ketika ia menggagas sebuah seminar pelajar dan mahasiswa Indonesia se-Eropa. Sebagai ketua panitia, ia bersama teman-teman lain telah bekerja keras. Hasilnya, bukan saja terselenggaranya untuk pertama kali sebuah seminar besar mahasiswa tentang Indonesia di Eropa pada 20-25 Juli tahun itu, melainkan juga berhasil mendatangkan tokoh besar Indonesia: Proklamator kemerdekaan dan bekas Wakil Presiden Indonesia, Mohd. Hatta.⁴⁹

Dalam memasuki percaturan politik nasional, awalnya B.J. Habibie banyak dipengaruhi oleh rasa nasionalisme masa mudanya yaitu kehidupan pada masa kemerdekaan yang ingin bebas dari penjajah dan peperangan, kemudian dalam perkembangannya rasa nasionalisme tersebut mulai terkikis karena jabatan-demi jabatan penting yang diraih serta kehidupan yang

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 122

semakin berkecukupan. Hal ini terbukti ketika B.J. Habibie muda diminta pulang oleh Soeharto untuk membantu pembangunan di Indonesia, padahal B.J. Habibie di Jerman telah hidup berkecukupan dan meraih jabatan penting dalam kedirgantaraan bangsa Jerman.

Kemudian dalam perjalanan karier politiknya, B.J. Habibie dianggap kurang memiliki rasa nasionalis bagi bangsa Indonesia, khususnya ketika menjabat sebagai Presiden ke-3 pada tahun 1998. Kemudian ditambah lagi dengan tempat tinggal yang dipilihnya, yaitu Jerman. Jadi jelas bahwa sikap nasionalisme B.J. Habibie sekarang telah luntur, karena meninggalkan perpolitikan begitu saja yang semakin kacau, khususnya di tahun 1999 dimana tahun tersebut merupakan akhir dari jabatannya sebagai Presiden RI ke-3.

Jadi tidak bisa dipungkiri, bahwa sikap nasionalisme B.J. Habibie muda telah mempengaruhi perkembangan awal karier politik B.J. Habibie. Walaupun akhirnya rasa nasionalisme tersebut luntur sedikit demi sedikit ketika memiliki jabatan-jabatan penting, khususnya sebagai Presiden RI ke-3.

Dari sini kita dapat memberikan satu kesimpulan, bahwa rasa nasionalisme B.J. Habibie muda yang terbelenggu dari penjajah telah berpengaruh dalam meraih cita-citanya, demi kemajuan bangsanya. Tetapi teriring dengan tercapai cita-citanya sebagai ahli teknologi dan meraih jabatan-jabatan penting, rasa nasionalisme terhadap bangsanya mulai pudar dan terkikis, buktinya dapat kita lihat dengan jelas bahwa sekarang B.J. Habibie keluar begitu saja dari arena percaturan politik nasional, yang

sebelumnya telah terlibat secara dalam, bahkan ikut menciptakan warna baru bagi percaturan politik. Selain itu B.J. Habibie juga lebih memilih tinggal di Jerman.

C. B.J. Habibie Sebagai Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Salah satu faktor pendorong B.J. Habibie memasuki percaturan politik tentu dipengaruhi oleh keahliannya sebagai ahli teknologi, karena hanya teknologi satu-satunya keahlian yang dimiliki dari B.J. Habibie. Sehingga dapat kita lihat bahwa kekuatan politik yang nantinya dimiliki B.J. Habibie tentunya juga berasal dari kemampuannya menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Dalam situasi semacam ini, kebutuhan manusia terhadap ahli ilmu pengetahuan dan teknologi justru menjadi lebih tinggi, karena baik suasana ketidakpastian maupun kemudahan-kemudahan kerja yang dilahirkannya semakin mendorong orang untuk memperoleh kepastian dan keunggulan untuk berkompetisi. Semua ini, pada akhirnya hanya bisa dipenuhi oleh teknologi. Maka siapa yang menguasai dan mampu mengontrol ilmu pengetahuan dan teknologi akan dengan otomatis terposisikan dalam status istimewa. Inilah, antara lain yang dialami B.J. Habibie ketika bekerja di Jerman Barat setelah terakui sebagai seorang ahli dalam teknologi kedirgantaraan.

Akan tetapi, kebutuhan akan seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi jauh lebih tinggi di negara-negara sedang

berkembang seperti Indonesia.⁵⁰ Dalam “stagnasi” strategi dan arah pembangunan semacam inilah, peran sains dan saintis menjadi lebih diperlukan oleh Indonesia. Ini terutama karena struktur medan pertarungan perdagangan dunia telah berubah kepada *horizontal division of labor* – dimana elemen-elemen keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menjadi determinatif dalam produksi komoditas perdagangan. Tentunya untuk memberi tempat yang lebih besar bagi para saintis ini, pergeseran-pergeseran politis pada jajaran elit negara harus dilakukan. Adam Schwarz penulis buku berjudul “*A Nation in Waiting, Indonesia in 1990s*” melihat gejala ini pada meleangkannya pengaruh kaum teknokrat – arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru di bawah pimpinan Widjojo Nitisastro – dalam posisi strategis pemerintahan. Pada saat yang sama, seperti terlihat pada susunan kabinet Presiden Soeharto ke-VI (1993-1998), mulai terlihat dominasi apa yang disebut dengan kaum teknolog di dalam pemerintahan.

Dalam beberapa hal, perubahan ini hanyalah kulminasi saja dari proses panjang yang telah berlangsung sebelumnya. Walau pun agak bersifat anakronistik dalam melukiskan persoalan itu di sini, kehadiran B.J. Habibie sebagai seorang saintis “terkemuka” – bahkan di negeri maju sekalipun – menjadi lebih penting ketika Indonesia menghadapi dilema dalam pemilihan strategi pembangunan. Walau tentu saja strategi pembangunan yang diusulkan dan dilaksanakan kaum teknokrat sejak awal Orde Baru masih tetap dijalankan, jelas sekali rintisan kearah strategi pembangunan alternatif – yang

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 150

didasarkan pada “sains” – telah pula menjadi keniscayaan. Dalam konteks inilah posisi politik B.J. Habibie menjadi penting. Dalam arti bahwa eksistensinya sebagai tokoh yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi basis kuat dalam usahanya mengambil peranan untuk turut menentukan keputusan-keputusan strategis tingkat nasional tentang arah perkembangan bangsa.⁵¹

Dengan latar belakang sebagai seorang ilmuan dan teknolog handal serta gagasannya tentang strategi pembangunan alternatif berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah B.J. Habibie mendapatkan “pijakan politis” dalam mendesain perkembangan bangsa Indonesia di masa depan.

Jadi kemampuan B.J. Habibie dalam IPTEK juga merupakan salah satu faktor pendorong dalam memasuki percaturan politik nasional. Hal ini dapat kita lihat ketika ia masuk dalam kelompok teknokrat, dimana B.J. Habibie mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya peran tersebut bergeser ke dalam perpolitikan nasional, karena memang kondisi ekonomi mempengaruhi kondisi politik dan sebaliknya.

D. Perkenalan B.J. Habibie Dengan Tokoh-Tokoh Islam Lewat ICMI

Terpilihnya B.J. Habibie sebagai ketua umum ICMI berasal dari dukungan para mahasiswa Brawijaya Malang serta para cendekiawan muslim yang telah mendukung terbentuknya organisasi bercorak Islam. Dukungan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 169

terhadap B.J. Habibie tentunya mempunyai beberapa alasan antara lain: karena prestasi yang telah diakui secara nasional maupun internasional dan para cendekiawan juga yakin terhadap keikhlasan B.J. Habibie dan komitmennya terhadap agama Islam yang dicintai kaum muslimin di atas segala-galanya.⁵² Sehingga B.J. Habibie dianggap dapat melaksanakan dan menyukseskan misi utama ICMI.⁵³

Dukungan dan alasan tersebut merupakan kekuatan bagi B.J. Habibie sampai terpilihnya sebagai ketua umum ICMI. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi B.J. Habibie untuk mengenal tokoh-tokoh cendekiawan muslim serta para tokoh-tokoh Islam lainnya yang telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan Islam di Indonesia, khususnya dari berbagai disiplin ilmu dan sejumlah “aliran” Islam, antara lain: Dawam Raharjo, Dr. Ir. Muslimin Nasution, Dr. Imaduddin Abdurrahim, Dr. M. Amien Rais, Dr. Riswanda Imawan, Dr. H. Said Agil Munawar, Prof. Dr. Harun Nasution, Dr. Nurcholish Madjid, dr. Saleh Aldjufri, dan Prof. Dr. Peunoh Daly.

Dukungan dan keakraban B.J. Habibie dengan tokoh-tokoh muslim tersebut membawa B.J. Habibie pada pengalaman baru dalam organisasi Islam yang berupa perjuangan terhadap umat Islam, khususnya perpolitikan Islam di Indonesia. Karena sebenarnya ICMI walaupun bukan organisasi politik tetapi telah memberi warna baru bagi perpolitikan Islam di Indonesia yang dimulai pada awal terbentuknya, tahun 1990. Alasan tersebut sangat wajar, karena di dalam ICMI sendiri terdapat banyak pengurusnya yang berlatarbelakang

⁵² Lihat Buku Adian Husaini, *op. cit.*, hlm. 57

⁵³ Misi utama ICMI adalah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) kaum muslimin

sebagai aktivis Islam, misalnya yang paling berpengaruh adalah Dr. Imaduddin Abdurrahim, Dr. Nurcholish Madjid, dan Dawam Raharjo.

Persatuan cendekiawan dan aktivis Islam terkemuka tersebut telah membawa B.J. Habibie pada perjuangan politik Islam dalam tingkat nasional. Misalnya saja Dr. Imaduddin Abdurrahim, seorang cendekiawan karismatik yang beberapa tahun memainkan peran penting dalam pendirian ICMI dimana sebelumnya telah melakukan gerakan-gerakan pembentukan organisasi serupa dengan ICMI, tetapi gagal karena selalu dibubarkan oleh pemerintah.⁵⁴

Kita tahu bahwa sebelumnya B.J. Habibie merupakan salah satu menteri terlama dalam kabinet Orde Baru dan sebagai ahli teknologi, sehingga jauh baginya untuk mengetahui gerakan-gerakan perjuangan Islam di Indonesia, apalagi berkenalan dengan para aktivis Islam yang berpengaruh dan terkemuka dalam tingkat nasional. Lewat ICMI B.J. Habibie telah mendapatkan pengalaman dan kesempatan baru yaitu berkenalan langsung dengan beberapa tokoh aktivis Islam terkemuka.

Perkenalan B.J. Habibie dengan para tokoh aktivis Islam tersebut telah mendorong B.J. Habibie untuk melangkah lebih jauh dan ikut serta dalam memperjuangkan umat Islam di Indonesia. Lewat ICMI B.J. Habibie dengan tokoh-tokoh Islam tersebut telah banyak melakukan gerakan-gerakan perjuangan umat Islam, khususnya melalui dakwah-dakwah langsung dengan umat Islam. Hal ini tentu merupakan salah satu pendorong bagi B.J. Habibie dalam memasuki percaturan politik, khususnya politik Islam di Indonesia.

⁵⁴ Lihat Buku Robert W. Hefner, *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, 1995, hlm. 53-54

E. Situasi dan Kondisi Politik Orde Baru Tahun 1990-1998

Kekuasaan Soeharto dimulai dari pertengahan 1965 hingga 1998 dengan sebutan Orde Baru. Jika melihat waktu yang cukup lama tersebut, maka sangat dalam penanaman politik Orde Baru yang dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, rupanya diuntungkan oleh peristiwa penumpasan G 30 S. Pertama Soeharto dapat meyakinkan masyarakat, khususnya elit politik bahwa pertentangan aliran yang terus menerus tidak ada manfaatnya, bahkan hanya merugikan dan menghambat kemajuan. Bahwa aliran apapun yang mau menangnya sendiri hanya akan berakhir dengan kehancuran, seperti terjadi pada Partai Komunis Indonesia, sebab tidak mungkin ada aliran tunggal yang paling berkuasa dan bisa menang sendiri. Selanjutnya Soeharto dapat meyakinkan MPRS untuk menyederhanakan partai-partai menjadi hanya dua, suatu hal yang dicita-citakan Soekarno tetapi tak pernah tercapai.

Tetapi rupanya hal ini belum cukup, untuk menghadapi kekuatan-kekuatan aliran, Presiden Soeharto memerlukan kekuatan pendukung “alternatif” yang tidak berasal dari kekuatan aliran, supaya tidak jatuh seperti Soekarno. Alternatif itu diperoleh dari Golkar dan ABRI. Alternatif itu ialah “Sekretariat Bersama Golkar”⁵⁵ yang sudah dirintis sejak 20 Oktober 1964

⁵⁵ Pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah pemerintahan Orde Lama, terdapat dua kubu politik yang saling berhadapan yaitu PKI dan TNI-AD dengan masing-masing organisasi tandingannya. Untuk menghimpun berbagai Ormas non partai sebagai kekuatan untuk menghadapi PKI, maka TNI-AD membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya disingkat Sekber Gokar pada tanggal 20 Oktober 1964. kemudian masa Orde Baru guna menghadapi pemilu 1971, dimana ikut serta sebagai kontestan berbagai partai politik yang ada pada saat itu. Sehingga Sekber Golkar

bersama ABRI dan dibentuk Soekarno untuk mendukung Demokrasi Terpimpin. Golkar semacam “alibi” bagi pemerintah Soeharto dari pertentangan partai-partai politik yang masih mewarisi semangat aliran.⁵⁶ Sementara itu, kedudukan ABRI sebagai satu jalur dari Golkar, mendapat peran istimewa dalam pemerintahan dengan ditetapkan konsep “Dwi Fungsi”⁵⁷ dengan Undang –undang no. 20 tahun 1982.

Jika diperhatikan kekuasaan pemerintahan Soeharto berdiri karena kekuatan yang berasal dari Partai Golkar sebagai OPP dan ABRI sebagai tangan kanan Soeharto dalam memerintah. Hal ini berlangsung selama 32 tahun pemerintahan Soeharto. Sehingga untuk memahami situasi dan kondisi politik Orde Baru, khususnya tahun 1990-1998, tentunya harus memahami beberapa peristiwa politik sebagai berikut :

1. Soeharto Merangkul Islam Sebagai Kekuatan Politik

Indonesia memiliki agama mayoritas Islam, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan, khususnya dalam mendukung pemerintahan Soeharto. Hal

dikembangkan menjadi Organisasi Politik Peserta Pemilu bernama Golkar. (Lihat Tuk Setyohadi, *op. cit.*, hlm. 141)

⁵⁶ Anton Sudiarja S.J, *Arah Reformasi Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2005, hlm. 32-33

⁵⁷ Dwi Fungsi ABRI: Pada awalnya Dwi Fungsi ABRI tumbuh sewaktu Revolusi Kemerdekaan melawan agresi Belanda pada tahun 1945-1949, ketika dalam kondisi perang banyak pejabat sipil seperti Kepala Desa tau Lurah, Camat, Bupati dan Residen yang meninggalkan tugas pemerintahan sehingga terjadi kekosongan. Dalam keadaan demikian, demi menunjukkan masih adanya pemerintahan RI disatu pihak serta demi mengayomi masyarakat yang sedang diteror oleh tentara Belanda dilain pihak, maka agar roda kehidupan masyarakat tetap berputar serta dukungan perang grilya dapat berlangsung, diisilah jabatan-jabatan seperti tersebut di atas oleh TNI dalam posisi sebagai Komandan Distrik Militer pada wilayah tingkat Kabupaten dan Sebagai Komandan Onder Distrik Militer pada wilayah tingkat Kecamatan. (Lihat Tuk Setyohadi, *op. cit.*, hlm. 144)

ini yang membuat Soeharto mengakui potensi Islam sebagai kekuatan yang tak terbantahkan.

Perubahan ini bisa dipastikan karena terjadi perubahan konstelasi politik di akhir tahun 1980-an. Menurut banyak pengamat, hal ini bisa ditunjukkan dengan berdirinya ICMI yang ternyata mendapat dukungan penuh dari Soeharto. Ini adalah bagian dari strateginya untuk memenangkan atau untuk memuluskan keinginannya menjadi Presiden periode berikutnya. Artinya, Soeharto menyetujui pembentukan ICMI yang sebenarnya inisiatif dan keinginan kalangan Islam tertentu, dan Soeharto melihat kemungkinan untuk menggunakannya bagi kepentingan kekuasaan.

Hal ini memang dapat terjadi pada pemerintahan Soeharto, karena memang pada tahun 1980-an dukungan terhadap Soeharto dari kalangan ABRI dirasakan menurun, sehingga ia memerlukan teman lain untuk menyeimbangkan dukungan yang diperlukan yang sebagian tidak ia dapatkan dari tentara. Hal inilah yang membuat Soeharto memerlukan ICMI sebagai wahana untuk mendapatkan dukungan umat Islam secara keseluruhan.⁵⁸

ICMI secara formal merupakan kekuatan yang merangkul semua golongan Islam. Meskipun ICMI bukan ide orisinal dari Soeharto, tetapi ia berhasil menempatkan para birokrat sebagai pemimpin ICMI, sehingga dengan demikian ia bisa mengendalikannya. Ini berarti Soeharto akan

⁵⁸ Lebih jelas baca buku Taufik Abdullah, *op. cit.*, hlm. 372-373

mendapat dukungan atau simpati balik dari kalangan Islam. Dengan demikian, Soeharto tidak akan kesulitan untuk merealisasikan ambisinya, karena kalangan Islam yang cukup “cerewet” terhadapnya akan berdiri dibelakangnya. Strategi ini terbukti cukup ampuh dalam meloloskan Soeharto menduduki kursi Presiden pada tahun 1993.⁵⁹

Kemudian munculnya ICMI bukan saja mengedepankan Islam ke permukaan, melainkan juga memunculkan B.J. Habibie, seorang teknolog kelahiran Pare-pare dan beragama Islam. Tokoh ini kemudian menjadi penting, bukan semata-mata karena jabatan lebih dari 25 posisi strategis, melainkan juga banyak yang menduga, B.J. Habibie adalah orang andalan Presiden Soeharto. Dia diperbolehkan melakukan apa saja di Indonesia, asal bukan revolusi.⁶⁰

Posisi B.J. Habibie itulah yang menimbulkan spekulatif politik, sebagaimana kemudian ICMI pun tak luput dari pandangan-pandangan yang bermuatan politik. Sampai akhirnya, ICMI dituduh sebagai kendaraan politik. Situasi politik semacam ini tentu akan membawa B.J. Habibie pada percaturan politik yang lebih dalam.

Baik situasi politik dan kedekatan B.J. Habibie dengan Presiden Soeharto, telah menjadi kekuatan politik istimewa baginya. Hal ini dapat kita lihat, bagaimana B.J. Habibie telah berlenggang di arena politik nasional tanpa halangan maupun tantangan yang berarti. Pernyataan ini

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 373

⁶⁰ Sunardian Wirodono, *Gerakan Politik Indonesia Catatan 1994*, Jakarta, Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara (Puspa Swara), 1995, hlm. 19

dapat dibuktikan dengan jabatan-jabatan politik yang diraihnya dalam pemerintahan Orde Baru.

2. Peristiwa Tahun 1997 - 1998

Sejak memasuki pertengahan tahun 1997 beberapa negara Asia mengalami krisis moneter, seperti Korea, Thailand, Malaysia, termasuk Indonesia. Hal ini menimbulkan nilai rupiah merosot, mulai bulan Juli 1997 sampai Mei 1998.⁶¹

Pada saat itu hutang luar negeri Indonesia, baik swasta maupun pemerintah sudah sangat besar. Tatanan perbankan nasional kacau, dan devisa nasional menipis. Permintaan bantuan ke IMF (International Monetary Fund) ternyata tidak mempercepat penyembuhan. Orang percaya bahwa ekonomi sangat terkait dengan politik. Kalau politik stabil, ekonomi akan sehat dan sebaliknya jika ekonomi kacau politikpun bergolak. Begitu besar pengaruh politik terhadap ekonomi dapat dicontohkan pada nilai tukar rupiah yang begitu mudah berubah, misalnya hanya karena ada berita bahwa Presiden Soeharto sakit.⁶²

Hal ini mengakibatkan popularitas pemerintah di mata rakyat menjadi semakin merosot. Rakyat menuntut dilakukan reformasi total,

⁶¹ Di bulan Agustus nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dari Rp. 2.575,- menjadi Rp. 2.603,-. Bulan berikutnya turun lagi menjadi Rp. 3.000,- per dolar US. Bulan Oktober menjadi Rp. 3.845,- per dolar US. Dalam bulan berikutnya kemerosotan nilai rupiah telah tidak masuk akal lagi. Pada bulan Mei 12 1998 rupiah diperdagangkan Rp. 10.000,- dan dalam seminggu berikutnya anjlok menjadi Rp. 12.600,- (data dari Kompas, 30 Juni 1998) (lihat buku Muhamad Hisyam, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 56)

⁶² Muhamad Hisyam, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, 2003, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 56

selain dalam bidang ekonomi, juga terutama dalam bidang politik dan hukum. Logikanya, krisis ekonomi Indonesia bukan hanya disebabkan merosotnya nilai rupiah tetapi juga oleh tatanan politik yang tidak demokratis, dan hukum yang terlampaui diabdikan kepada kekuasaan yang otoriter. Sehingga tidak mendatangkan keadilan yang sebenarnya.⁶³

Suasana memprihatinkan di kalangan rakyat semakin terasa dan tidak direspon oleh kalangan atas dan tidak memperhatikan rasa simpati yang sungguh-sungguh terhadap rakyat kecil yang paling menderita karena krisis. Keberpihakan kepada nasib rakyat banyak yang mengalami ketidakpastian hidup, inilah yang menggerakkan mahasiswa melakukan aksi-aksi keprihatinan di kampus-kampus mereka.

Aksi-aksi mahasiswa dimulai sejak permulaan tahun 1998. Arahnya pelan-pelan bergeser, dari keprihatinan terhadap krisis ekonomi ke reformasi total dan penolakan terang-terangan atas rezim Orde Baru. Memasuki bulan Mei aksi-aksi mahasiswa bertambah berani. Aksi mahasiswa di bulan Mei digelar di berbagai kota dan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Demo-demo mahasiswa di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Surakarta, Medan Lampung, Ujung Pandang dan kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan dan mengakibatkan sejumlah mahasiswa terluka. Sampai akhirnya menimbulkan peristiwa penembakan mahasiswa atau yang lebih kita kenal dengan Tragedi

⁶³ *Ibid.*, hlm. 57

Trisakti. Tertembaknya empat mahasiswa Trisakti⁶⁴ menyulut api kemarahan demonstran mahasiswa dan aktivis reformasi lainnya.

Sampai akhirnya pada tanggal 18 Mei 1998, kompleks gedung DPR/MPR di senayan mulai dimasuki demonstran. Ribuan mahasiswa dengan aneka warna jaket almamater masing-masing mulai memasuki pelataran gedung itu. Berbeda seperti biasanya, aparat keamanan yang menjaga gedung DPR/MPR, pada pagi itu membiarkan mahasiswa demonstran memasuki pelataran. Kemudian Amien Rais, tokoh terkemuka gerakan reformasi hadir di DPR, sementara di luar gedung hiruk-pikuk mahasiswa demonstran bertambah terus, di ruang komisi II DPR melakukan dengar pendapat dengan Amien Rais. Pada hari itu juga rombongan Gerakan Reformasi Total yang dipimpin oleh Prof. Subroto, mantan Sekjen OPEC. Dalam rombongan Subroto itu terdapat sejumlah tokoh kritis dari kalangan sipil maupun militer, seperti Mangunwidjaja, W.S. Rendra, Sri Edy Swasono, Dimiyati Hartono, Kusnadi Harjasumantri, Mahar Marjono, Rizal Ramli, Frans Seda, Ali Sadiki dan Solihin GP. Subroto membacakan pernyataan di depan pimpinan Fraksi ABRI, mendesak MPR mengadakan Sidang Umum Istimewa untuk mengambil kembali amanat MPR teradap Soeharto dan B.J. Habibie. Tujuan itu juga disuarakan oleh civitas akademika IKIP Jakarta yang datang ke DPR dan diterima oleh Fraksi ABRI. Mereka menuntut agar Soeharto melaksanakan janjinya di Kairo, yakni mengundurkan diri. Suara demonstran maupun

⁶⁴ Empat mahasiswa meninggal karena tembakan peluru tajam, mereka antara lain Elang Mulia, Heri Hertanto, Hendriawan, dan Afidin Alifidin Royan.

tamu-tamu yang diterima DPR sama, yaitu menuntut kembali mandat MPR terhadap Soeharto atau Soeharto mundur dari kursi Presiden. Esok harinya demonstran bertambah banyak dan mereka bertahan menduduki gedung itu sampai Soeharto benar-benar lengser keprabon.⁶⁵

Sampai akhirnya Soeharto lalu menyusun naskah pengunduran diri, dibantu oleh Sa'adilah Mursjid, Yusril Ihza Mahendra (Staf Khusus Sekretaris Kabinet) dan Mayjen Jasril Jakub (Sekretaris Militer Kepresidenan). Pernyataan berhenti Presiden Soeharto dirancang sebagai pernyataan sepihak, dalam arti tanpa minta persetujuan terlebih dahulu dengan MPR. Setelah keputusan Soeharto diberitahukan, ajudan Presiden memberi tahu para pimpinan DPR/MPR bahwa mereka akan diterima besok, pukul 08.30 di Istana Merdeka. Jam 08.00 di Ruang Jepara Istana Merdeka telah hadir seluruh pimpinan DPR/MPR, termasuk Sekjen Afif Ma'aruf. Wakil Presiden B.J. Habibie hadir jam 08.25 dan sekitar 5 menit kemudian Presiden Soeharto datang disertai putrinya Siti Hardiyanti Rukmana yang juga menteri sosial. Bersama Wapres dan istri, Presiden dan putrinya memasuki ruang Jepara, bersalaman dengan para pimpinan DPR/MPR dan sejumlah menteri lalu ke ruang Credentials, tempat biasanya dipakai untuk melantik para pejabat. Beberapa saat kemudian, Presiden Soeharto membacakan pernyataan berhenti dari jabatan sebagai Presiden.

⁶⁵ Muhamad Hisyam, *op. cit.*, hlm. 76

Menurut Konstitusi Indonesia, apabila Presiden berhenti maka Wakil Presiden secara otomatis menjadi Presiden. Begitu selesai membaca pernyataan diri itu, Wapres B.J. Habibie tampil ke depan corong, mengucapkan sumpah jabatan Presiden. Upacara ini berlangsung 10 menit, dan mantan Presiden Soeharto serta Presiden B.J. Habibie segera meninggalkan istana.⁶⁶

Demikian situasi politik Indonesia tahun 1997 - 1998, dimana terjadi kekacauan dalam pemerintahan Soeharto. Hal ini tentu berdampak bagi bidang ekonomi dan hukum, karena saling berkaitan dan mendukung. Dan berakhirnya kekuasaan Soeharto dimana yang kita kenal dengan Sebutan Orde Baru sekaligus perpindahan kekuasaan ke pemerintahan B.J. Habibie, yang sering kita kenal dengan masa reformasi. Situasi dan kondisi ini memang bukan sebagai awal pendorong B.J. Habibie memasuki percaturan politik tetapi sebagai awal bagi B.J. Habibie dalam mencapai puncak karier politik, yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia ke-3. Sehingga peristiwa ini harus kita pahami sampai akhir masa kekuasaannya di tahun 1999.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 87-88

BAB IV

**AKTIVITAS B.J. HABIBIE DALAM PERCATURAN POLITIK
NASIONAL TAHUN 1990-1998**

Kembalinya B.J. Habibie pada tahun 1974 ke Indonesia tentunya tidak langsung terjun ke dalam percaturan politik nasional. Hal ini tentunya ada beberapa faktor pendorong sampai pada waktunya B.J. Habibie memiliki peranan dalam percaturan politik nasional. Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa faktor-faktor tersebut dapat kita amati bagaimana sosok B.J. Habibie mempunyai peluang yang besar dalam memasuki percaturan politik.

Keterlibatan B.J. Habibie dalam kenegaraan memang dimulai ketika ia pulang ke Indonesia, tetapi keterlibatan politik nasional secara mencolok dapat kita lihat pada tahun 1990, ketika B.J. Habibie diangkat menjadi Ketua Umum ICMI. Memang organisasi ini bukan organisasi politik, tetapi orang-orang didalamnya banyak yang berasal dari para politikus, hal ini tentunya akan membawa ICMI secara langsung maupun tidak langsung ke dalam percaturan politik. Kemudian ditambah lagi pada tahun 1993 B.J. Habibie diangkat menjadi Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar, yang tentunya jelas berdinamika dalam percaturan politik nasional. Kedua jabatan inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan besar bagi perjalanan karier politik B.J. Habibie. Sampai akhirnya dapat menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI sebagai puncak karier politiknya.

Setiap peluang dan kesempatan yang dimiliki B.J. Habibie tentunya dapat dimanfaatkan dalam memperlancar karier politiknya. Lalu apa saja yang

dilakukan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional ? Untuk mengetahui lebih dalam apa saja yang dilakukan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional, tentunya kita akan membahas dinamika politik B.J. Habibie dalam jabatan-jabatan politiknya. Dari Jabatan-Jabatan politik tersebut kita dapat mengetahui dan membaca apa saja yang dilakukan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional.

A. Aktivitas B.J. Habibie Sebagai Ketua Umum ICMI (1990)

Sebuah Simposium Nasional Cendekiawan Muslim telah diselenggarakan tanggal 6 sampai 8 Desember 1990 di Student Centre Universitas Brawijaya Malang untuk membahas konsepsi dan pemikiran cendekiawan muslim dalam pembangunan terutama menghadapi abad XXI yang ditandai dengan perkembangan global dan nasional yang besar pengaruhnya terhadap masyarakat.

Maksud dan tujuan⁶⁷ diselenggarakannya simposium adalah menyiapkan cendekiawan muslim untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat Indonesia abad XXI, menumbuhkan sikap kepedulian cendekiawan muslim terhadap perkembangan pembangunan, menyalurkan konsepsi dan pemikiran cendekiawan muslim, merumuskan peran serta dalam pembangunan masyarakat Indonesia termasuk IPTEK, rekayasa sosial ekonomi dan merumuskan wadah peran serta cendekiawan muslim dalam proses pembangunan nasional.⁶⁸

⁶⁷ Dasar kegiatan penyelenggaraan simposium adalah Pancasila, UUD 1945, dan GBHN 1988

⁶⁸ Angkatan Bersenjata, *Simposium Nasional Cendekiawan Muslim di Malang*, Dokumentasi Kliping Tentang Peta Politik di Indonesia, Tahun II, No. 23 Desember 1990, CSIS

Pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) muncul dari sekelompok Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang yang tergabung dalam kelompok kegiatan kerohanian Islam. Hal ini muncul karena merasa prihatin melihat kondisi umat Islam yang terjadi polarisasi dalam kepemimpinan umat.

Kemudian para mahasiswa tersebut berkonsultasi dengan Rektor Universitas Brawijaya, Rektor Universitas Muhammadiyah, serta beberapa tokoh cendekiawan muslim lainnya di Malang. Dan salah satu tokoh yang mereka inginkan menjadi Ketua Umumnya adalah B.J. Habibie, karena tokoh tersebut mereka kagumi setelah membaca riwayat hidupnya dalam sebuah majalah.⁶⁹

Pertimbangan pencalonan B.J. Habibie sebagai ketua didasarkan atas tiga hal, antara lain prestasi yang bersangkutan sebagai cendekiawan muslim yang telah diakui secara nasional dan internasional, nama baik B.J. Habibie yang walaupun sudah menyanggah suatu jabatan politik, tetapi masih sangat menonjol dalam bidang profesi insinyur dan manajer serta keyakinan para mahasiswa dan cendekiawan atas keikhlasan hati B.J. Habibie di dalam komitmennya terhadap agama Islam.⁷⁰

Dalam makalahnya dapat kita lihat bagaimana upaya yang ingin dicapai oleh B.J. Habibie, yaitu “peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses transformasi masyarakat”. Hal ini dapat dilakukan melalui bangsa Indonesia yang dapat membentuk pusat-pusat keunggulan di dalam

⁶⁹ Lebih jelas baca buku A. Makmur Makka, *op. cit.*, hlm. 133

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 136-137

perusahaan atau lembaga pendidikan dan penelitian swasta serta pemerintah yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa. B.J. Habibie juga menyarankan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan memberikan perhatian lebih banyak pada aspek paedagogi pendidikan. Selain itu B.J. Habibie juga mengajak kaum muslim menjadi pelopor dan penggerak utama bagi bangsa Indonesia untuk berilmu, berteknologi, berbudaya dan berproduktivitas tinggi.⁷¹

Ketua Umum ICMI, B.J. Habibie mengingatkan, wadah ICMI haruslah mampu mengatasi kecenderungan semangat sektarianisme dalam masyarakat dan juga haruslah dicegah dari kecenderungan mengambil sikap eksklusif sebagaimana sikap diperlihatkan oleh banyak kelompok serupa di masa lalu. Umat Islam di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, pernah hidup dalam suasana terkotak-kotak menurut paham dan aliran serta pandangan yang berbeda-beda di bidang ekonomi, sosial dan budaya. “Sebuah organisasi baru hanya akan bermakna jika ia merupakan sumbangan positif guna menyelesaikan problem pengkotakkan dan sektarianisme itu”.

Hal ini yang membuat B.J. Habibie menggarisbawahi, sejak semula diperlukan ketegasan bahwa ICMI berwawasan keislaman yang inklusif dan menyatu dengan ajaran Pancasila dan UUD’45 sebagai landasan bangsa dan negara RI dalam sikap keindonesiaan sejati. Dengan demikian menurut B.J. Habibie, wadah ICMI dapat dilihat sebagai kelanjutan logis dari sejarah

⁷¹ Presiden Soeharto, *Tepat Waktu, Prakarsa Cendekiawan Muslim Bahas Pembangunan Abad XXI*, Dokumentasi Kliping Tentang Peta Politik di Indonesia, Tahun II, No. 23 Desember 1990, CSIS hlm. 49

mengenai dorongan keagamaan dan semangat kebangsaan umat Islam Indonesia sejak berdirinya Sarikat Dagang Islam tahun 1912 lalu.⁷²

Tampilnya B.J. Habibie sebagai pemimpin ICMI adalah panggilan jaman. Menurut pakar sejarah, Kuntowijoyo, dalam sebuah tulisannya menguraikan tiga babakan sejarah perjuangan umat Islam: (1) Era HOS Tjokroaminoto yang tampil dengan mitos ratu adil. Era ini disebut sebagai periode ideologi, ajaran Islam diturunkan menjadi sejumlah ideologi perjuangan. (2) Era Mohammad Natsir, yang disebut sebagai periode ideologi konstitusional, di mana Natsir menyuarkan ideologi Islam dalam konstituante. Era B.J. Habibie, yang disebut sebagai periode ilmu, dimana ajaran Islam diartikan menjadi teori ilmu pengetahuan plus teknologi. B.J. Habibie menyuarkan pentingnya Imtak dan Iptek.⁷³

Dalam kiprahnya selama 5 tahun pertama di dalam ICMI, B.J. Habibie telah mengatur langkah sistematis sebagai berikut: (1) Membuat anggaran dasar yang mencerminkan kebesaran jiwa bangsa Indonesia dan umat Islam khususnya. (2) Merekayasa atau membuat wajah ICMI dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya. (3) Membuat aproksimasi yang menjamin mekanisme sistem dan mekanisme organisasi ICMI yang kompatibel dengan budaya bangsa dan nafas agama. (4) Pelaksanaan program ICMI yang efektif dan efisien pada hakikatnya didasarkan pada Alquran dan Sunnah yang berorientasi pada

⁷² Wapres Sudarmono, 1990, *ICMI Harus Mampu Menjadi Kawan Perjuangan Yang Handal*, Ibid, hlm. 60

⁷³ A. Makmur Makka, *The True Life of Habibie (Cerita dibalik Kesuksesan)*, Jakarta, Pustaka Iman, 2008, hlm. 154

suksesnya pembangunan nasional Indonesia sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945. (5) Menyusun dan melaksanakan program yang bisa di terima oleh umat Islam Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia dalam wujud apa yang disebut 5-K. (Kualitas iman dan takwa, kualitas berpikir, kualitas berkarya, kualitas bekerja, kualitas hidup).⁷⁴

Dalam kelima langkah tersebut dan pembabakan periode menurut Kuntowijoyo tentang perjuangan umat Islam, dapat kita amati hasil dari aktivitas B.J. Habibie yang berwujud 5-k, seperti yang terdapat pada langkah kelima. Sehingga dapat kita lihat keberhasilan B.J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI yang lebih mencolok ialah memberikan ‘wajah modern dan berorientasi pembangunan’ kepada umat Islam Indonesia, terutama para cendekiawannya. Hal ini dapat kita lihat dari upaya B.J. Habibie ketika menyampaikan makalah dalam symposium pertama ICMI di Malang, yaitu mengajak kaum muslim menjadi pelopor dan penggerak utama bagi bangsa Indonesia untuk berilmu, berteknologi, berbudaya dan berproduktivitas tinggi.⁷⁵

Pendekatan berorientasi pembangunan yang di ambil B.J. Habibie untuk kaum Muslimin berasal dari pandangannya kepada agamanya sendiri, yaitu Islam⁷⁶. Karena itulah, nilai-nilai yang terkandung dalam Islam bisa

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 156

⁷⁵ Lebih jelas baca tulisan Presiden Soeharto, dalam Kompas, 7 Desember 1990, *Dokumentasi Kliping Tentang Peta Politik Indonesia*, Tahun II, No. 23, CSIS, hlm. 50

⁷⁶ Konsep B.J. Habibie tentang Islam memiliki lima unsur. Pertama, Tuhan itu dekat dengan ruh. Kedua, semua orang adalah makhluk Tuhan dan setiap orang dapat mencapai Tuhan dengan upaya sendiri tanpa melalui pihak-pihak lain, katakanlah pihak ketiga. Ketiga, Alquran adalah petunjuk utama dan sasaran pencapaian Tuhan. Keempat, Kalau orang percaya kepada Tuhan, ia harus berdisiplin menaati ajarannya termasuk shalat lima kali sehari. Kelima, Islam adalah agama yang sangat sederhana dan rasional. Islam tidak mendorong primordialisme atau

diterapkan ke dalam demokrasi modern. Menurut B.J. Habibie, kalau sampai ada masalah dan perseteruan, bukan Islamnya melainkan orang-orangnyalah yang menggunakan Islam sebagai dagangan politik untuk mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri.⁷⁷

Selain itu hasil dari aktivitas B.J. Habibie sebagai ketua umum ICMI dalam hal politik yaitu mendapatkan pengaruh politik yang lebih luas. Hal ini tentu saja dapat terjadi, karena pengenalan B.J. Habibie dengan para cendekiawan muslim telah memperkaya dan menambah pengetahuannya tentang perjuangan umat Islam di Indonesia.

Sebelum B.J. Habibie terpilih sebagai ketua umum ICMI, pengaruhnya hanya sebatas jabatan-jabatannya dalam pemerintahan, tetapi setelah mendapatkan jabatan baru sebagai ketua umum ICMI, B.J. Habibie telah memperluas pengaruhnya dalam perjuangan umat Islam dan juga mengenal perpolitikan Islam di Indonesia.

Hal ini dapat kita buktikan dari keanggotaan dan kepengurusan ICMI yang terdiri dari berbagai kalangan, antara lain para birokrat dan teknolog, tokoh-tokoh dan pemikir muslim moderat, dan yang ketiga para pemimpin Islam yang lebih ambisius dengan ICMI.⁷⁸ Dari susunan keanggotaan dan

eksklusivitas karena agama ini mendukung dan mendorong toleransi. (lihat Bilveer Singh, *op cit*, 63)

⁷⁷ Bilveer Singh, *op cit*, 63

⁷⁸ Ada dalam buku Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 594. Menurut Adam Achwarz, ada tiga kelompok besar yang menjadi inti organisasi ICMI, yang pertama adalah birokrat pemerintah dan teknolog yang bekerja di bawah B.J. Habibie di BPPT ditambah dengan sekumpulan pemimpin Golkar, professor universitas, pebisnis dan menteri-menteri kabinet yang didorong memasuki organisasi tersebut, mereka antara lain menteri Aswar Anas, Harmoko, dan Salah Afiff, maupun juga para mantan pembantu B.J. Habibie seperti Wardiman Djojonegoro dan Haryanto Dhanutirto. Kedua, tokoh-tokoh dan pemikir moderat yang senang dengan ICMI sebagaimana adanya yakni sebagai

kepengurusan tersebut, tentulah penguruh B.J. Habibie lebih luas, khususnya dalam perpolitikan nasional. Berdasarkan hal ini juga, B.J. Habibie berhasil menyatukan para cendekiawan muslim Indonesia kedalam satu wadah. Hal ini sekaligus memberikan para Cendekiawan tersebut, yang tergabung dalam keanggotaan dan kepengurusan ICMI telah memberikan warna baru bagi percaturan politik nasional, khususnya perjuangan umat Islam di Indonesia.

Demikian aktivitas B.J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI, dimana setiap yang dilakukan berdasarkan upaya membangun ide bersama-sama dengan umat Islam, khususnya para cendekiawan muslim.

B. Aktivitas B.J. Habibie Sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar (1993)

Keterlibatan B.J. Habibie dalam Partai Golkar sebenarnya sudah sejak lama, yaitu sebagai anggota dari partai tersebut. Tetapi keterlibatan B.J. Habibie dalam tubuh Golkar ini sangat mencolok ketika B.J. Habibie memperoleh jabatan kepengurusan dalam Golkar, khususnya ditahun 1993, dimana B.J. Habibie memperoleh jabatan sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar. Jabatan ini sangatlah strategis bagi B.J. Habibie dalam melancarkan karier politiknya, khususnya dalam tubuh Golkar itu sendiri.

forum intelektual dimana kaum muslim yang memiliki perhatian bisa berdiskusi bagaimana Islam bisa dibuat menjadi kekuatan sosial yang lebih positif dalam Indonesia modern, mereka antara lain Nurcholish Madjid, Emil Salim dan Sutjipto Wirosaradjono. B.J. Habibie bisa dibilang masuk kedalam kelompok satu dan dua. Ketiga, pemimpin Islam diluar pemerintah dengan rencana yang lebih ambisius untuk ICMI. Mereka lebih menyukai suatu kendaraan politik yang lebih aktif mewakili aspirasi Muslim modernis. Mereka antara lain, Amien Rais, Sri Bintang Pamungkas, Dawam Rahardjo, Amin Azis, Watik Pratiknya, Adi Sasono, Lukman Harun, Nasir Tamara dan Imaduddin Abdulrahim.

Dimana pada masa itu juga Golkar sedang akan melaksanakan Munas (Musyawarah Nasional) V. Hal ini yang membuat berpengaruhnya B.J. Habibie dalam tubuh Golkar, karena selain sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar, B.J. Habibie juga terpilih sebagai Ketua Tim Formatur dalam Munas V Golkar.

B.J. Habibie mendapat kepercayaan dari Ketua Dewan Pembina Golkar Soeharto, yakni sebagai Wakil Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar untuk masa tahun 1992. Pada tahun itu juga Soeharto, sudah menugaskan B.J. Habibie untuk menduduki kursi Koordinator Harian Dewan Pembina untuk tahun 1993.

Dari kepercayaan besar yang diberikan Soeharto tersebut, banyak kalangan yang mulai menyoroti sepak terjangnya di kancah politik. Dengan jabatan yang disandanginya di tubuh partai berlambang pohon beringin itu, orang-orang pun segera menghubungkan akses dan pengaruh yang dimiliki B.J. Habibie dengan posisi strategis di tubuh partai maupun pemerintahan. Bahkan dalam Munas V Golkar, orang banyak menyebut peranannya yang besar dalam menentukan Ketua Umum Golkar yang bakal terpilih serta susunan kepengurusan Golkar periode 1993-1998.⁷⁹

Dalam Munas V Golkar B.J. Habibie mempunyai peran yang sangat besar, hal ini tentunya sangat wajar, dimana posisi B.J. Habibie adalah Ketua Tim Formatur.⁸⁰ Hal ini dapat dilihat melalui sentuhan tangan B.J. Habibie,

⁷⁹ A.Makmur Makka, *op cit*, hlm. 157

⁸⁰ Tim Formatur yang disepakati terdiri dari tujuh orang dengan ketuanya B.J. Habibie. Enam anggota lainnya masing-masing terdiri dari Prof. E. Eddy Agus Salim Mokodompit, MA (ketua DPD Sultra) sebagai sekretaris, Ismail Hassan dan Dr. Haryanto (keduanya mewakili pengurus

Munas V ternyata mampu memberikan kesan bahwa Golkar “tampil beda” karena pertama kalinya seorang sipil murni menjadi Ketua Umum DPP Golkar. Selain itu juga berlangsungnya regenerasi besar-besaran pada tubuh organisasi Golkar.

Terpilihnya seorang sipil sebagai Ketua Umum DPP Golkar, bukan berarti mempertentangkan ABRI dengan sipil dalam tubuh Golkar, tetapi semua ini menunjuk suatu realita yang terjadi dan sama-sama bisa kita simak. Bila memperhatikan hasil empat kali putaran Munas Golkar, ini telah memunculkan babakan baru dalam sejarah Golkar. Hal ini dapat kita lihat dari tampilnya sosok Harmoko yang merupakan orang sipil pertama sebagai tampuk pimpinan pada organisasi kekuatan politik terbesar pada saat itu. Melihat komposisi yang ada, dapat dikatakan B.J. Habibie jeli menempatkan orang muda sebagai daya tarik guna merebut hati masyarakat agar menjadi simpatisan Golkar.

Selain itu juga B.J. Habibie memiliki ketebalan tanggung jawab moral yang tinggi terhadap pertumbuhan Golkar ke depan, disamping sikapnya yang sportif dan arif, B.J. Habibie mampu membedakan fungsi dan peranannya, baik dalam kapasitas Ketua Tim Formatur yang bisa mengakomodasikan aspirasi yang berkembang juga sebagai Dewan Pembina B.J. Habibie berkepentingan untuk mengamankan kesepakatan yang telah diputuskan.

Selain itu B.J. Habibie juga membuat “kualifikasi” dalam menginventarisasikan nama-nama, disamping untuk melihat sampai sejauh

DPP), H. Sunarso (ketua DPD I Sumut). Ditangan merekalah nama-nama kader Golkar digodog sebelumnya akhirnya diputuskan nama resmi yang berhak duduk dipengurusan DPP Golkar. (lihat buku A.Makmur Makka, *op cit*, hlm. 157)

mana kemampuan kader dapat melaksanakan program serta berfungsi rangkap sebagai “operator” yang mampu menggerakkan Golkar memenangkan perebutan suara pada pemilu. Hal ini dilakukan karena B.J. Habibie tahu bahwa Golkar tidak mungkin dapat mengandalkan kader-kader yang mudah terserang jantung, darah tinggi, rematik, gula atau penyakit ketuaan lainnya.

Sebagai politisi B.J. Habibie mempunyai konsep dan strategi yang matang agar “Golkar lebih berkibar”. Paling tidak sampai menjelang pemilu berikutnya B.J. Habibie telah merampungkan kerangka pikir yang cemerlang sehingga kemunculan Golkar dapat terlihat cantik dan dikenal simpatik. Prakarsa ini tentunya akan memberikan dampak positif untuk keluarga besar Golkar.⁸¹

Demikian dapat kita lihat dinamika B.J. Habibie dalam tubuh Golkar, khususnya sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar dan Ketua Tim Formatur Munas V Golkar. Dimana B.J. Habibie telah memberikan peranannya dalam kancah percaturan politik nasional, khususnya dalam tubuh partai Golkar.

C. Aktivitas B.J. Habibie Sebagai Wakil Presiden dan Presiden RI (1998)

Pencalonan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden sebenarnya sudah dibicarakan oleh banyak orang menjelang Sidang Umum MPR bulan Maret 1993. Waktu itu B.J. Habibie beserta dua nama lainnya yaitu Try Sutrisno dan Sudharmono, disebut-sebut sebagai kandidat Wapres. Ditengah polemik

⁸¹ Baca Indra SSD Harahap, *Langkah Habibie Pada Munas V Golkar*, Suara Pembaruan, Dokumentasi Kliping Tentang Peta Politik Indonesia, Tahun V, No. 21, November 1993, CSIS

seputar pencalonan B.J. Habibie sebagai Wapres, ia malah membuat pernyataan yang berisi dukungan terhadap Try Sutrisno menjadi Wapres. Bahkan B.J. Habibie memuji Try Sutrisno orang yang cocok untuk menempati posisi Wapres. Sebaliknya B.J. Habibie dengan sederhana hanya menyatakan “Terima kasih, jabatan Wakil Presiden adalah suatu kehormatan bagi keluarga saya. Tapi kalau masih dipercaya, saya ingin melanjutkan pengabdian saya seperti sekarang ini”.⁸² Ucapan B.J. Habibie tersebut mengisyaratkan bahwa B.J. Habibie menolak secara halus.

Sementara Sidang Umum MPR Maret kian mendekat, banyak orang berpandangan bahwa B.J. Habibie akan diangkat menjadi Wakil Presiden. Mengingat peranannya B.J. Habibie yang sangat menonjol dalam pengaturan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, maka makin kuatlah peluangnya sebagai calon Wapres.

Ketika pencalonan itu dilaksanakan dengan pemungutan suara, tampak B.J. Habibie menang tipis atas Try Sutrisno yakni lima banding empat suara. Namun sebelum keunggulan Wapres itu diumumkan ke masyarakat, Kassospol ABRI Letnan Jenderal Harsudiyono Hartas mengumumkan bahwa fraksi ABRI akan mengajukan Try Sutrisno sebagai calon Wapres. Ini disusul dengan suara-suara senada dari fraksi-fraksi lainnya di MPR.⁸³ Berdasarkan suara dari fraksi-fraksi di MPR sekaligus pernyataan Habibie yang mendukung pencalonan Wapres tersebut, akhirnya B.J. Habibie “kalah”.

⁸² Lebih Jelas lihat buku A. Makmur Makka, *op. cit.*, hlm. 161-165

⁸³ Baca Buku Bilveer Singh, *op. cit.*, hlm. 21-23

Sampai pada akhirnya pada tanggal 18 Februari 1998, seluruh fraksi utama di MPR telah menyepakati B.J. Habibie sebagai calon Wapres meski sebelumnya telah muncul banyak calon, antara lain Wapres yang masih menjabat yaitu Try Sutrisno. Terpilihnya B.J. Habibie sebagai Wapres sebenarnya dianggap dapat bekerja sama dengan Presiden. Maksudnya, orang yang akan mendampingi Presiden haruslah orang yang tidak semata visioner dan berpandangan jauh ke depan, tetapi juga dapat membantu Presiden menghadapi tantangan-tantangan globalisasi, berkemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta terkenal baik di forum-forum nasional maupun internasional.⁸⁴

Peranan B.J. Habibie sebagai Wapres sebenarnya belum terlihat jelas, karena jabatannya sebagai Wapres sangatlah singkat yaitu dari 10 Maret sampai 20 Mei 1998. Kemudian pada tanggal 21 Mei Soeharto lengser sebagai Presiden, pada hari dan tanggal yang sama B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden RI ketiga sampai berlangsungnya pemilu tahun 1999.

Walaupun B.J. Habibie menjabat Presiden dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hingga 20 Oktober 1999 atau 17 bulan, tetapi telah melakukan perubahan-perubahan yang sangat besar dan jelas. Perubahan-perubahan tersebut dapat kita lihat dari berbagai macam bidang, khususnya dalam percaturan politik nasional.

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden di malam hari 21 Mei 1998, B.J. Habibie mengidentifikasikan tiga bidang prioritas pemerintahnya,

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 23

yakni politik, ekonomi dan hukum. Menyusul pengumuman kabinet, B.J. Habibie menyebut bahwa secara politik tujuan pemerintahnya adalah merevitalisasi negeri, terutama dengan merevisi undang-undang pemilihannya. Dalam bidang ekonomi, prioritas diberikan kepada penghapusan monopoli dan berbagai praktek yang mendorong berlangsungnya persaingan tak sehat. Dalam bidang hukum, tekanan diberikan kepada revisi undang-undang Subversi.⁸⁵

Dalam bidang politik, dimana B.J. Habibie telah melakukan banyak perubahan, khususnya dalam partai-partai politik. Beberapa hari memangku jabatan Kepresidenan B.J. Habibie sudah mengumumkan bahwa “kabinet reformasi pembangunan-nya” akan mengizinkan berdirinya partai politik apa saja asal tidak memecah belah masyarakat dengan mempertajam perbedaan-perbedaan berdasarkan kesukuan, keagamaan, kesukubangsaan dan sosial. Dalam Jangka tak sampai setahun menjabat, Presiden B.J. Habibie telah berhasil mengubah petabumi politik Indonesia dari era ‘hanya tiga partai politik sebagai payung yang sah’ menjadi fase nyaris ‘bebas bagi siapa saja’. Hal ini dikukuhkan lewat Undang-undang No. 1/1999 tentang partai politik. Disaat siap melaksanakan Pemilihan Umum di bulan Juni 1999, hampir 250 partai politik telah terdaftar, dan 48 partai diantaranya kemudian diijinkan berperan serta didalam pemungutan suara.

Selain itu peranan B.J. Habibie dalam bidang politik bisa kita lihat melalui kebebasan pers, yang telah membantu mendorong demokratisasi di

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 65-66

Indonesia. selain hak untuk membentuk organisasi politik dan menyatakan pendapat, salah satu terobosan penting Presiden B.J. Habibie ialah keputusannya untuk membebaskan 200-an narapidana, termasuk pimpinan buruh Mukhtar Pakpahan dan mantan anggota DPR dari PPP yaitu Sri Bintang Pamungkas.

B.J. Habibie juga mencabut undang-undang subversi⁸⁶ dan menyatakan mendukung budaya oposisi serta melakukan pendekatan kepada mereka yang selama ini menentang Orde Baru. Diantaranya K.H. Abdurrahman Wahid dan para aktivis Petisi-50 yaitu kelompok yang sebagian besar terdiri dari mantan jenderal yang menuduh Soeharto melanggar prinsip Pancasila dan Dwi Fungsi.

Dalam rangka melaksanakan kebebasan Pers, B.J. Habibie juga mencabut ketentuan pembatalan SIUPP yang selama ini menghantui wartawan terhadap pembredelan surat kabar dan majalah.⁸⁷

Kemudian yang sangat populer pada masa kepresidenan B.J. Habibie adalah kasus Timor-Timur. Bagi Presiden B.J. Habibie, Timor-Timur dianggap sebagai masalah yang merepotkan bagaikan krikil dalam sepatu dan bahkan dirasa mengganggu kinerja Kabinet Reformasi⁸⁸ yang ia pimpin dalam menghadapi bermacam persoalan reformasi. Dalam hal ini Presiden B.J. Habibie mengambil sikap pro-aktif dengan menawarkan dua pilihan bagi

⁸⁶ Subversi adalah penggulingan kekuasaan (pemerintah) dengan jalan melemahkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

⁸⁷ Tuk Setyohadi, *op. cit*, hlm. 184

⁸⁸ Kabinet yang dipimpin B.J. Habibie diberi nama kabinet reformasi. Kabinet berjumlah 36 menteri yang terdiri dari partai PPP sebanyak 2 orang, Golkar 4 orang, PDI 1 orang, ABRI 6 orang, Utusan Daerah 2 orang, golongan intelektual dan perguruan tinggi 0 orang, Birokrasi 13 orang, dan LSM 2 orang. (Lihat buku Tuk Setyohadi, *op. cit*, hlm. 184)

penyelesaian Tim-Tim yaitu disatu pihak memberikan "status khusus dengan otonomi luas" atau dilain pihak "memisahkan diri dari RI ". Otonomi luas berarti diberikan kewenangan atas berbagai bidang seperti politik, ekonomi dan lain-lain, kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan serta moneter dan fiskal. Sedangkan memisahkan diri berarti secara demokratis dan konstitusional, serta secara terhormat dan damai, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui pemungutan suara atau jajak pendapat dengan sponsor PBB yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999, penduduk Tim-Tim ternyata menghendaki kemerdekaan. Presiden B.J. Habibie menanggapi hasil referendum ini dengan menyatakan bahwa Indonesia mulai 1 Januari 2000 akan memusatkan perhatian pada 26 prinsip dan tidak diganggu lagi dengan masalah Tim-Tim.⁸⁹ Demikian dinamika B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden dan Presiden RI, dimana telah melakukan banyak perubahan-perubahan dalam berbagai bidang. Hal ini menjadi sangat menarik, karena dalam waktu yang relatif singkat, B.J. Habibie telah memberikan pengaruhnya yang besar bagi pemerintahan Indonesia. Setiap peranan tentunya telah memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, hal ini juga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan dalam bangsa ini.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 186

BAB V

**PERANAN B.J. HABIBIE DALAM PERCATUREN POLITIK NASIONAL
TAHUN 1990-1998**

Aktivitas B.J. Habibie telah memberikan peranan yang cukup besar bagi percaturan politik nasional, khususnya tahun 1990-1998. Yang pertama peranan B.J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI, kedua sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar, ketiga sebagai Wakil Presiden dan Presiden RI. Berikut akan kita bahas, bagaimana peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional, khususnya di dalam jabatan-jabatan tersebut.

A. Peranan B. J. Habibie Sebagai Ketua Umum ICMI

Peranan B.J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI dalam percaturan politik nasional dapat kita pahami dari setiap aktivitas B.J. Habibie dalam organisasi ICMI. Yang pertama ialah, B.J. Habibie mampu berperan menyatukan para cendekiawan Muslim dalam satu wadah organisasi. Kedua, peranan B.J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI ialah penghubung antara pemerintahan Soeharto dengan umat Islam, khususnya para cendekiawan muslim. Kedua peranan ini akan kita bahas panjang lebar, sebagai berikut :

Pertama, peranan B.J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI ialah dapat menyatukan para cendekiawan muslim Indonesia dalam satu wadah. Hal ini dapat kita amati dari para pengurus dan anggota dari ICMI, antara lain para

aktivis muslim Indonesia dan tergolong sebagai cendekiawan muslim (Imaduddin Abdulrahim, Nurcholish Madjid dan Dawan Rahardjo).

Dalam upaya menyatukan para cendekiawan tersebut, B.J. Habibie menggunakan pendekatan kepada pembangunan yang selaras dengan Islam. Selain itu B.J. Habibie juga mempunyai komitmen untuk bangkitnya kaum Muslim Indonesia yang memiliki keterkaitan kepada kemodernan dan pembangunan. Ini nantinya mewujudkan dalam konsep B.J. Habibie tentang kaum Muslimin Indonesia yang bercirikan iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berproduktivitas tinggi.⁹⁰

Setelah B.J. Habibie mampu menerapkan keyakinan dan tekadnya dibidang ini, kemudian para cendekiawan mulai melihat bahwa B.J. Habibie mampu memimpin ICMI, yang merupakan organisasi para cendekiawan Muslim Indonesia. Dari sinilah B.J. Habibie mulai merangkul dan menyatukan para cendekiawan Muslim Indonesia, kecuali Ketua Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid, yang menganggap ICMI menumbuhkan sektarianisme.

Kedua, peranan B.J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI ialah mampu menjadi penghubung antara pemerintahan Soeharto dengan umat Islam, khususnya para cendekiawan muslim. Untuk memahami hal ini, tentu kita harus tahu bagaimana hubungan pemerintahan Orde baru dengan umat Islam.

Ketika Orde Baru mulai berkuasa pada tahun 1966, disambut gembira oleh umat Islam. Sebab umat Islam menganggap munculnya Orde Baru terkandung harapan besar kemungkinan kembalinya umat Islam dalam

⁹⁰ Baca buku, Bilveer Singh, *op. cit.*, hlm. 206

panggung politik nasional. Namun dalam kenyataannya umat Islam mengalami kekecewaan sangat besar dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah Orde Baru dengan mempersempit ruang gerak bagi cendekiawan muslim untuk berkiprah dalam proses pembangunan nasional. Sehingga para cendekiawan hanya bermain dan melakukan tambal sulam dipinggiran arus besar modernisasi.⁹¹

Oleh karena itu mendorong para cendekiawan muslim untuk mencari alternatif strategi pengembangan umat yang lebih kondusif agar Islam dapat bersifat luwes di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang membawa hubungan kurang baik antara pemerintahan Orde Baru dengan umat Islam, khususnya para cendekiawan muslim.

Kelahiran ICMI telah memberikan titik terang untuk memperbaiki hubungan pemerintahan dengan umat Islam. Dan hal ini mendorong kesadaran bersama akan tanggung jawab yang harus dimainkan oleh pemerintah Orde Baru dan para cendekiawan untuk merumuskan strategi keumatan di masa depan.

Kemudian secara kebetulan, B.J. Habibie terpilih sebagai Ketua Umum ICMI, dimana kita tahu bahwa B.J. Habibie merupakan salah satu dari kalangan pemerintahan Orde Baru dan juga sebagai orang kepercayaan Presiden Soeharto. Hal ini tentu akan menguntungkan pemerintahan Orde Baru, dimana untuk memperbaiki hubungan umat Islam, khususnya para cendekiawan muslim dengan pemerintahan.

⁹¹ Zuli Qodir dan M. Iqbal Songell (ed), *ICMI, Negara, dan Demokratisasi*, Yogyakarta, Kelompok Studi Lingkaran bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 88

Dari sini tentu kita dapat membaca peranan B.J. Habibie yang telah menjadi penghubung antara pemerintahan Orde Baru dengan para cendekiawan muslim Indonesia. Dimana sebelumnya telah merenggang antara pemerintahan Orde Baru dan umat Islam.

B. Peranan B.J. Habibie sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar

B.J. Habibie sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar tentu saja berperan sebagai jembatan antara pengurus DPP Golkar dengan Ketua Dewan Pembina Golkar yaitu Soeharto. Tetapi dalam tulisan ini akan dibahas komposisi B.J. Habibie sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar yang berperan bagi tubuh Golkar.

B.J. Habibie menjabat sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar dimulai sejak tahun 1993, dimana dapat kita lihat peranannya ketika menjelang dan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang ke V. Peranannya disini, B.J. Habibie berkepentingan untuk mengamankan kesepakatan yang telah diputuskan.

Selain menjabat Sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina, B.J. Habibie juga menjabat sebagai ketua formator dalam Munas V Golkar. Dari sini dapat kita amati bahwa peranan B.J. Habibie lebih pada penyusunan DPP Golkar, dimana akan terjadi perombakan pada kepengurusan DPP Golkar dalam Munas V Golkar.

B.J. Habibie untuk pertama mendapat kepercayaan Ketua Dewan Pembina Golkar Soeharto, sebagai Wakil Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar untuk masa tahun 1992. Di tahun itu juga, Soeharto menugaskan B.J. Habibie untuk menduduki kursi Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar untuk tahun 1993. “Beliau bilang, kamu jadi Wakil Ketua Harian Dewan Pembina Golkar. Dan tahun depan kamu jadi ketua hariannya,” cerita B.J. Habibie seperti dikutip Tempo.⁹²

Dari kepercayaan yang diberikan Soeharto, banyak kalangan yang menyoroti sepak terjangnya dikancah politik, khususnya dalam tubuh Golkar. Dan dalam Munas V Golkar, banyak orang menyebut peranannya yang besar untuk menentukan Ketua Umum Golkar dan susunan pengurus DPP Golkar periode 1993-1998.

Dengan posisi strategis ini, tentu saja B.J. Habibie dapat berperan dalam menentukan naiknya Ketua Umum Golkar, yaitu Harmoko. Oleh sebagian pihak hal ini merupakan rekayasa dari B.J. Habibie, karena kapasitasnya sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar. Demikian pula susunan pengurus DPP Golkar yang terbentuk sesuai aturan main organisasi, yang secara otomatis merupakan wewenang tim formatur hasil konsensus Munas, dimana tim tersebut diketuai oleh B.J. Habibie sendiri.

Jadi peranan B.J. Habibie sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar adalah untuk mengamankan kesepakatan yang telah diputuskan dan melalui sentuhan tangan B.J. Habibie Munas V, ternyata mampu memberikan

⁹² A. Makmur Makka, *op. cit.*, hlm. 190

kesan “tampil beda” pada Golkar karena pertama kalinya seorang sipil murni menjadi Ketua Umum DPP Golkar. Dan yang Kedua, berlangsungnya regenerasi besar-besaran pada tubuh Golkar, dimana B.J. Habibie sendiri yang menjadi Ketua Tim Formatur Munas V.

C. Peranan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden dan Presiden RI

Jabatan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden sangatlah singkat (70 hari), sehingga sulit untuk mencermati hasil kerja sebagai Wakil Presiden. Kemudian jabatan sebagai Presiden RI, walaupun juga dianggap singkat (17 bulan), tetapi telah memberikan perubahan yang sangat besar bagi percaturan politik nasional.

Secara politik, dalam masa tugasnya selama 17 bulan sebagai Presiden, B.J. Habibie telah memperkenalkan perubahan-perubahan yang sangat penting pada dunia politik Indonesia, terutama menyangkut pengembangan dan perlindungan demokrasi yang baru saja dibangun.

Kebijakan B.J. Habibie yang berorientasi demokrasi merupakan terobosan dan pemutusan pertalian dengan era Orde Baru yang lalu serta membuka babak baru liberalisasi politik di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai aktivitas B.J. Habibie terkait kebijakan politik, antara lain pembentukan partai-partai politik, kebebasan menyatakan pendapat, toleransi terhadap pers yang berlebihan kebebasannya, pembentukan mekanisme yang

transparan bagi pemilihan umum yang bebas dan adil maupun sistem pertanggungjawaban politik yang layak.⁹³

Jadi peranan B.J. Habibie sebagai Presiden RI ke-3, selama 17 bulan dalam waktu yang sependek itu, B.J. Habibie telah meletakkan sebuah sistem yang berorientasi demokrasi, sesuatu yang sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Tetapi hal ini juga memberikan dampak yang harus dipikirkan, yaitu memberikan kemajemukan dalam percaturan politik nasional serta sulit untuk mengontrolnya.

Demikianlah peranan yang mencolok dalam pemerintahan B.J. Habibie dimana merupakan puncak karier politiknya. Dan tidak bisa dipungkiri, bahwa pengaruhnya masih ada sampai sekarang, yaitu kebebasan berpolitik, khususnya berdirinya partai-partai baru.

⁹³ Bilveer, Singh, *op. cit.*, hlm. 201

BAB VI

KESIMPULAN

Peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998 dapat dilihat melalui jabatan-jabatan politik yang disandanginya, antara lain Ketua Umum ICMI, Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar, Wakil Presiden, dan Presiden RI. Dari jabatan politik tersebut, dapat kita amati berbagai aktivitas B.J. Habibie dan juga peranannya dalam percaturan politik nasional.

Percaturan politik nasional dalam tulisan skripsi ini maksudnya adalah strategi atau siasat dari perjuangan kekuatan-kekuatan politik nasional, khususnya tahun 1990-1998. Kekuatan-kekuatan politik tersebut antara lain: OPP (Golkar, PPP, PDI), ABRI, Umat Islam dan Mahasiswa. Pembagian kekuatan politik tersebut berguna mengetahui dan mencari di mana posisi B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998. Posisi B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998, berada di dalam tubuh Golkar dan Umat Islam.

Percaturan politik nasional pada tahun 1990-1998, merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto atau yang kita kenal dengan sebutan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde baru telah dilakukan strategi politik, antara lain adalah pertama, menjadikan Golkar sebagai “wadah politik” dan yang kedua, meningkatkan peran Dwi Fungsi ABRI dalam berbagai mekanisme ketatanegaraan baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan bahkan sampai ke dunia bisnis, terutama perusahaan-perusahaan BUMN. Inilah strategi yang digunakan pemerintahan Orde Baru supaya melanggengkan

pemerintahannya, dimana hal ini telah banyak melibatkan B.J. Habibie sebagai orang kepercayaan Presiden Soeharto.

Faktor pendorong B.J. Habibie memasuki percaturan politik nasional, juga dipengaruhi oleh beberapa sebab, antara lain: kedekatan B.J. Habibie dengan Soeharto sebagai Presiden RI, Nasionalisme B.J. Habibie muda, B.J. Habibie sebagai ahli IPTEK, Perkenalan B.J. Habibie dengan tokoh-tokoh Islam lewat ICMI, situasi dan kondisi politik Orde Baru, khususnya tahun 1990-1998. Faktor pendorong tersebut merupakan suatu analisa yang dapat dilihat melalui perjalanan karier politiknya.

Aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998 dapat dilihat secara jelas melalui jabatan-jabatan politik yang disandangnya. Antara lain: pertama, aktivitas B.J. Habibie sebagai ketua Umum ICMI yaitu mengajak kaum muslimin menjadi pelopor dan penggerak utama bagi bangsa Indonesia untuk berilmu tinggi, berbudaya dan berproduksi tinggi. Kedua, aktivitas B.J. Habibie sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar yaitu telah memberikan warna baru pada Golkar karena telah berlangsung regenerasi besar-besaran pada tubuh Golkar. Hal ini dilakukan B.J. Habibie pada Munas V dimana B.J. Habibie selain sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar juga sebagai Ketua Tim Formaturnya. Ketiga, aktivitas B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden dan Presiden RI, kegiatan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden belum terlihat jelas karena jabatannya yang sangat singkat yaitu dari 10 Maret sampai 20 Mei 1998. Kemudian kegiatan B.J. Habibie sebagai Presiden walaupun juga relatif singkat tetapi telah melakukan banyak aktivitas politik, antara lain

mengijinkan berdirinya partai-partai politik baru, kebebasan pers dan juga pembebasan 200-an tapol/napol.

Peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional merupakan suatu analisa berdasarkan aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998. Pertama, peranan B.J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI yaitu dapat menyatukan para cendekiawan muslim Indonesia dalam satu wadah dan juga mampu menjadi penghubung antara pemerintahan Orde baru dengan umat Islam. Kedua, peranan B.J. Habibie sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar yaitu penghubung antara pengurus DPP Golkar dengan Ketua Dewan Pembina Golkar yaitu Soeharto, dan juga berperan dalam Munas V yang telah menentukan Ketua Umum Golkar dan susunan pengurus DPP Golkar periode 1993-1998. Ketiga, Peranan B.J. Habibie sebagai Presiden yaitu telah meletakkan sebuah sistem yang berorientasi demokrasi. Hal ini dapat kita amati melalui kebijakan-kebijakan politiknya antara lain: pembentukan partai-partai politik, kebebasan menyatakan pendapat, toleransi terhadap pers yang berlebihan kebebasannya, pembentukan mekanisme yang transparan bagi Pemilihan Umum yang bebas dan adil.

Demikian kesimpulan dalam tulisan skripsi ini, dimana telah dijabarkan panjang lebar mengenai peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998. Hal ini tentu juga akan menumbuhkan pemahaman dan pelajaran mengenai percaturan politik nasional tahun 1990-1998.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Anton Sudiarja. 2005. *Arah Reformasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Dedy Djamaluddin. 1998 *Gejolak Reformasi Menolak Anarki*. Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Fachry Ali. 1999. *Esai Politik Tentang Habibie*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Floriberta S Aning. 2006. *100 Tokoh Yang Mengubah Dunia*. Yogyakarta: Narasi.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hassan Shadily. 1984. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Hefner, Robert W. 1995. *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Heuken. 1984. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*. Jilid IV, Edisi ke-5. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Husaini Adian 1995. *Habibie Soeharto dan Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kuper Adam & Kuper Jessica. 1996. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Makmur Makka. 1995. *B.J.Habibie Kisah Hidup & Kariernya*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- _____. 2008. *The True Life of Habibie (Cerita dibalik Kesuksesan)*. Jakarta: Pustaka Iiman.
- Martin Handoko. 1992. *Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhamad Hisyam. 2003. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum, Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qodir, Zuli & Songell, M. Iqbal (ed). 1995. *ICMI, Negara, dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Kelompok Studi Lingkaran bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Ricklefs. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Rusli Karim. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Singh, Bilveer. 2000. *Habibie dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Cidesindo.
- Sri Bintang Pamungkas. 1993. *Mahasiswa dan Masa Depan Politik Indonesia*. Yogyakarta: PSIP DPP IMM.
- Sunardian Wirodono. 1995. *Gerakan Politik Indonesia Catatan 1994*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara (Puspa Swara).
- Taufik Abdullah. 2003. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tuk Setyohadi. 2002. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: CV. Rajawali Corporation.
- Yahya Muhaimin. 1991. *"Bisnis dan Politik" Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial).

Surat Kabar :

- Angkatan Bersenjata. 1990. Simposium Nasional Cendekiawan Muslim di Malang. *Dokumentasi Kliping Tentang Peta Politik di Indonesia (CSIS)*, Tahun II, No. 23 Desember 1990.
- Indra SSD Harahap. 1993. Langkah Habibie Pada Munas V Golkar. *Suara Pembaruan, Dokumentasi Kliping Tentang Peta Politik Indonesia (CSIS)*, Tahun V, No. 21, November 1993.
- _____. "ICMI Bukan Organisasi Politik". Kompas, 5 Februari 1997 dalam *Dokumen Kliping Tentang Peta Politik Di Indonesia (CSIS)*. Kompas, 5 Februari 1997 .

Soeharto. 1990. Tepat Waktu, Prakarsa Cendekiawan Muslim Bahas Pembangunan Abad XXI, *Dokumentasi Kliping Tentang Peta Politik di Indonesia (CSIS)*, Tahun II, No. 23 Desember 1990.

Sudarmono. 1990. ICMI Harus Mampu Manjadi Kawan Perjuangan Yang Handal. *Dokumentasi Kliping Tentang Peta Politik di Indonesia (CSIS)*, Tahun II, No. 23 Desember 1990.





Gambar foto B.J. Habibie
(Wakil Presiden RI ke 7 dan Presiden RI ke 3)

SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Mata Pelajaran : Sejarah
 Satuan Pendidikan : SMA
 Kelas/Semester : XII / I
 Tahun Pelajaran : 2008/2009
 Standar Kompetensi : Menganalisis Perjuangan Sejak Orde Baru Sampai Dengan Masa Reformasi

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Penilaian			Alokasi Waktu	Media / Bahan	Sumber
				Jenis Tagihan	Bentuk Instrumen	Contoh Instrumen			
Menganalisis perkembangan pemerintahan Orde baru	A. Materi Pokok : Peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998	Siswa berdiskusi tentang Percaturan politik nasional tahun 1990-1998.	Menjelaskan Percaturan politik nasional tahun 1990-1998.				1x45 menit	<ul style="list-style-type: none"> OHP Gambar-gambar Buku sejarah yang relevan 	M.C. Ricklefs, <i>Sejarah Indonesia Modern 1200-2004</i> , Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005
		Siswa berdiskusi tentang Faktor pendorong B.J. Habibie memasuki percaturan politik nasional.	Menjelaskan Faktor pendorong B.J. Habibie memasuki percaturan politik nasional.						

		<p>Siswa berdiskusi tentang Aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998.</p>	<p>Menjelaskan Aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998.</p>							<p>A. Makmur Makka, <i>B.J.Habibie Kisah Hidup & Kariernya</i>, Jakarta, Gema Insani Pres, 1995</p>
		<p>Siswa berdiskusi tentang Peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998</p>	<p>Menjelaskan Peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998</p>							

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Yogyakarta, 11 Maret 2009

Guru Mata Pelajaran

Nama
NIP

Ponco Margo Utomo



**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**

1. Nama Sekolah : SMA
2. Program : Ilmu Pendidikan Sosial
3. Mata Pelajaran : Sejarah
4. Kelas / semester : XII / I
5. Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan masa reformasi
6. Kompetensi Dasar : 2.1. Menganalisis perkembangan pemerintahan Orde Baru
7. Indikator :
 - Mendeskripsikan percaturan politik nasional tahun 1990-1998
 - Mendeskripsikan faktor-faktor pendorong B.J. Habibie masuk dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998
 - Mendeskripsikan aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998
 - Mendeskripsikan peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998
8. Alokasi Waktu : 1 x 45 menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan percaturan politik nasional tahun 1990-1998
2. Siswa dapat menjelaskan tentang faktor pendorong B.J. Habibie masuk dalam percaturan politik nasional
3. Siswa dapat menjelaskan aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional
4. Siswa dapat menjelaskan peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional
5. Siswa dapat menjelaskan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai Reformasi

B. MATERI PEMBELAJARAN

1. Percaturan politik nasional tahun 1990-1998
2. Faktor-faktor pendorong B.J. Habibie masuk dalam percaturan politik nasional
3. Aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional
4. Peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional
5. Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

C. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN

1. Metode Pembelajaran
 - Diskusi dan Tanya Jawab
2. Media Pembelajaran
 - OHP dan gambar-gambar yang relevan

D. STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Pendahuluan
Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
 - a) Motivasi :
 - Siswa dapat menganalisis tentang peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional
 - Memperlihatkan gambar yang relevan
 - b) Apersepsi :
 - Apakah yang dimaksud dengan percaturan politik nasional ?
 - Guru memberikan gambaran secara umum tentang situasi dan kondisi percaturan politik nasional tahun 1990-1998
2. Kegiatan Inti
 - a) Guru mengarahkan siswa untuk membaca buku penunjang
 - b) Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari empat atau lima siswa setiap kelompoknya.
 - c) Guru membagikan bahan diskusi dan siswa mulai berdiskusi
Bahan diskusi :

- Kelompok 1, tentang percaturan politik nasional tahun 1990
 - Kelompok 2, tentang faktor pendorong B.J. Habibie masuk dalam percaturan politik
 - Kelompok 3, Aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik
 - Kelompok 4, Peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional
 - Kelompok 5, tentang perlunya kehidupan berdemokrasi dalam sebuah negara
- d) Setelah selesai berdiskusi masing-masing perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan siswa yang lain menanggapinya.
- e) Guru meminta tiap kelompok mengumpulkan hasil diskusinya
- f) Guru meminta siswa untuk merefleksikan tentang pelajaran yang sudah dipelajari
3. Penutup
- a) Guru memberikan klarifikasi pada pada jawaban yang kurang tepat dan memberikan penguatan pada jawaban yang benar.
 - b) Guru memberikan tugas berupa soal untuk pertemuan berikutnya.
 - c) Guru meminta pendapat secara lisan dari siswa, manfaat dan nilai-nilai apa yang didapat setelah mempelajari materi tersebut.

E. SUMBER BELAJAR

- 1) Makmur Makka, *B.J.Habibie Kisah Hidup & Kariernya*, Jakarta, Gema Insani Pres, 1995
- 2) M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005

F. PENILAIAN

a) Penilaian Proses

- Alat Penilaian : Lembar Observasi
- Bentuk : Format Penilaian

No	Nama	Mengharg ai Teman	Mengambil Giliran	Mengajukan Pertanyaan	Memprese ntasikan hasil	Menjawa Pertanyaan	Mendengark an dengan Aktif	jml

Kriteria penilaian menggunakan skala sikap 1-5, dengan kriteria:

- Skor 1 : pasif, tidak kooperatif dan tidak menghargai teman.
- Skor 2 : pasif, tidak kooperatif tetapi menghargai teman.
- Skor 3 : pasif, kooperatif dan dapat menghargai teman.
- Skor 4 : aktif, kooperatif dan dapat menghargai teman.
- Skor 5 : sangat aktif, sangat kooperatif dan dapat menghargai teman.

$$N = \frac{JumlahSkor}{30} \times 100\%$$

$$NA = \frac{Nilai Proses + Nilai Hasil}{2}$$

b) Penilaian Hasil

- Alat Penilaian : Tes
- Bentuk : Essay

Butir Pertanyaan

1. Bagaimana percaturan politik nasional tahun 1990-1998 ?

2. Faktor apa yang mendorong B.J. Habibie memasuki percaturan politik nasional tahun 1990-1998 ?
3. Bagaimana aktivitas B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998 ?
4. Bagaimana peranan B.J. Habibie dalam percaturan politik nasional tahun 1990-1998 ?

c) Tindak Lanjut

- a. Siswa dinyatakan berhasil apabila tingkat pencapaiannya lebih dari 65%
- b. Memberikan remedial untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 65%
- c. Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65%

Yogyakarta, 11 Maret 2009

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Nama
NIP

Ponco Margo Utomo